



Kementerian PPN/
Bappenas



PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM 2.0

KONTRIBUSI AKTOR NONPEMERINTAH

BUKU 3

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2025



PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM
**KONTRIBUSI AKTOR
NONPEMERINTAH**

2.0

TIM PENYUSUN

Pengarah

Leonardo A. A. Teguh Sambodo
*Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam,
dan Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas*

Penanggungjawab

Nizhar Marizi
Direktur Lingkungan Hidup

Tim Editor

Irfan Darliazi Yananto
Adrianto Shifa Al Aro
I Ketut Gede Arta Putra

Tim Penyusun

Andi Syahputra
Litany Meliala
Nurul Rusdayanti
Ridcho Andrian
Adinda Berlin Antika Sari Lavidia
Annisa Faradina Astini

Desain Sampul Buku

Oki Triono
Agung Saputra

Tim Pendukung

Riska Apriyani
Andrea Yudyat

Mitra Pembangunan



GREEN
CLIMATE
FUND



KONTRIBUTOR DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM (PBI)

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

Kementerian/Lembaga

Dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim 2.0 merujuk pada berbagai data dan informasi yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Data dan informasi tersebut dihimpun dari Direktorat atau Unit Teknis, antara lain:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6. Kementerian Pertanian;
7. Kementerian Kesehatan;
8. Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kementerian Perhubungan;
10. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
11. Kementerian ATR/BPN
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kontributor Lainnya

Penyusunan dan penyelesaian buku ini terlaksana berkat dukungan serta kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para pelaku usaha serta mitra pembangunan atas kontribusi dan dukungan yang diberikan dalam mendorong pengembangan kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim. Pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini antara lain:

1. Putri Nuraini
2. Nevky Emiraj Saputra
3. Budhi Ulaen
4. Bima Indra Mahendrata



DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kontributor	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Singkatan	v
01 PERAN LEMBAGA NONPEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM	1
02 KEGIATAN LEMBAGA NONPEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM	4
03 LOKASI KEGIATAN LEMBAGA NONPEMERINTAH	8
04 PROFIL LEMBAGA NONPEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM	19
05 PENUTUP	30
Lampiran	i



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim	6
Tabel 2	Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Kelautan dan Pesisir	10
Tabel 3	Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Air	13
Tabel 4	Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Pertanian	15
Tabel 5	Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Kesehatan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kolaborasi Pembangunan Berketahanan Iklim	3
Gambar 2	Proporsi Lembaga Nonpemerintah Pada Sektor Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim	5
Gambar 3	Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Kelautan dan Pesisir	9
Gambar 4	Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Air	13
Gambar 5	Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Pertanian	15
Gambar 6	Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Kesehatan	17
Gambar 7	Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Lintas Sektor	18

A		M	
Adakarbon	Yayasan Agathis Dammara Karbon	MCI	Mercy Corps Indonesia
AmRC	American Red Cross	MLH PP	Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat
G		Muhammadiyah	Muhammadiyah
GAIN	Global Alliance for Improved Nutrition	O	
GET 4.0	Green Economy Transformation	Oxfam	Oxford Committee for Famine Relief
GIZ ClimB	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Climate and Biodiversity Hub Indonesia	P	
I		PMI	Palang Merah Indonesia
ICCSR	Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap	PT AAL	PT Astra Agro Lestari
ICLEI	International Council for Local Environment Initiatives	PT ACA	PT Asuransi Central Asia (ACA)
IFRC	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies	R	
K		RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
KIAT	Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
KONSEPSI	Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi	U	
L		UCLG ASPAC	United Cities and Local Governments Asia Pacific
LAMFI	Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia	UNICEF	United Nations Children's Fund
LLHPB PP	Lembaga Lingkungan Hidup dan	W	
Aisyiyah	Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyiyah	WHO	World Health Organization
LPBI NU	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama	WRI	World Resources Institute
LTKL	Lingkar Temu Kabupaten Lestari	WVI	Wahana Visi Indonesia
		WWF	World Wildlife Fund
		Y	
		Yayasan Bintari	Yayasan Bina Karta Lestari
		YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara
		YKI	Yayasan Konservasi Indonesia
		YLBA	Yayasan Lahan Basah



1. PERAN LEMBAGA NONPEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

Intensifikasi dampak perubahan iklim telah teridentifikasi sebagai fenomena yang terjadi secara nyata yang tercermin oleh peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas (IPCC, 2021). Dampak perubahan iklim tersebut telah menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian yang berimplikasi langsung pada pencapaian target pembangunan. Kondisi tersebut menuntut komitmen bersama sebagai upaya mendorong pembangunan yang adaptif dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Komitmen Indonesia dalam hal tersebut diimplementasikan melalui perumusan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai Program Prioritas dalam Prioritas Nasional 8.

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dihadapi. Oleh karena itu, peran kolektif dari berbagai pihak menjadi kunci dalam merespons tantangan iklim secara efektif. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, bahwa setiap pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, harus menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan arah kebijakan RPJPN. Lembaga nonpemerintah merupakan entitas di luar pemerintahan yang ikut serta memberikan perannya dalam keberlangsungan suatu kegiatan, terdiri atas organisasi sipil masyarakat, akademisi, sektor swasta, maupun individu.

Keragaman kondisi fisik geografis Indonesia menciptakan tingkat kerentanan dan bahaya yang bervariasi pada masing-masing wilayah. Hal tersebut

berimplikasi pada pendekatan intervensi yang dilakukan harus bersifat lokal spesifik menyesuaikan dengan karakteristik yang dihadapi tiap wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga nonpemerintah memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan capaian Pembangunan Berketahanan Iklim terutama dalam melakukan inisiasi dan intervensi pada skala komunitas. Buku ini memuat inventarisasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh 37 lembaga nonpemerintah dalam mendukung capaian Pembangunan Berketahanan Iklim di berbagai wilayah Indonesia. Informasi program dan kegiatan intervensi yang diperoleh melalui forum group discussion (FGD) dipetakan berdasarkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan berdasarkan sektor dan pendekatan Pembangunan Berketahanan Iklim. Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kegiatan pada lokasi-lokasi prioritas terdampak perubahan iklim secara kolektif.

Di luar lembaga yang teridentifikasi dalam publikasi ini, masih terdapat berbagai aktor non pemerintah lain yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda Pembangunan Berketahanan Iklim, tetapi belum terdokumentasikan secara sistematis. Oleh karena itu, perluasan cakupan pemetaan pada periode selanjutnya menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai ekosistem pelaksana kegiatan ketahanan iklim di tingkat pusat maupun daerah. Upaya perluasan tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya basis data aktor dan intervensi, tetapi juga mendorong koordinasi implementasi aksi antar pemangku kepentingan sehingga kolaborasi multipihak dapat terbangun secara lebih terstruktur, terpadu, dan efektif dalam memperkuat ketahanan iklim nasional.



Gambar 1. Kolaborasi Pembangunan Berketahanan Iklim

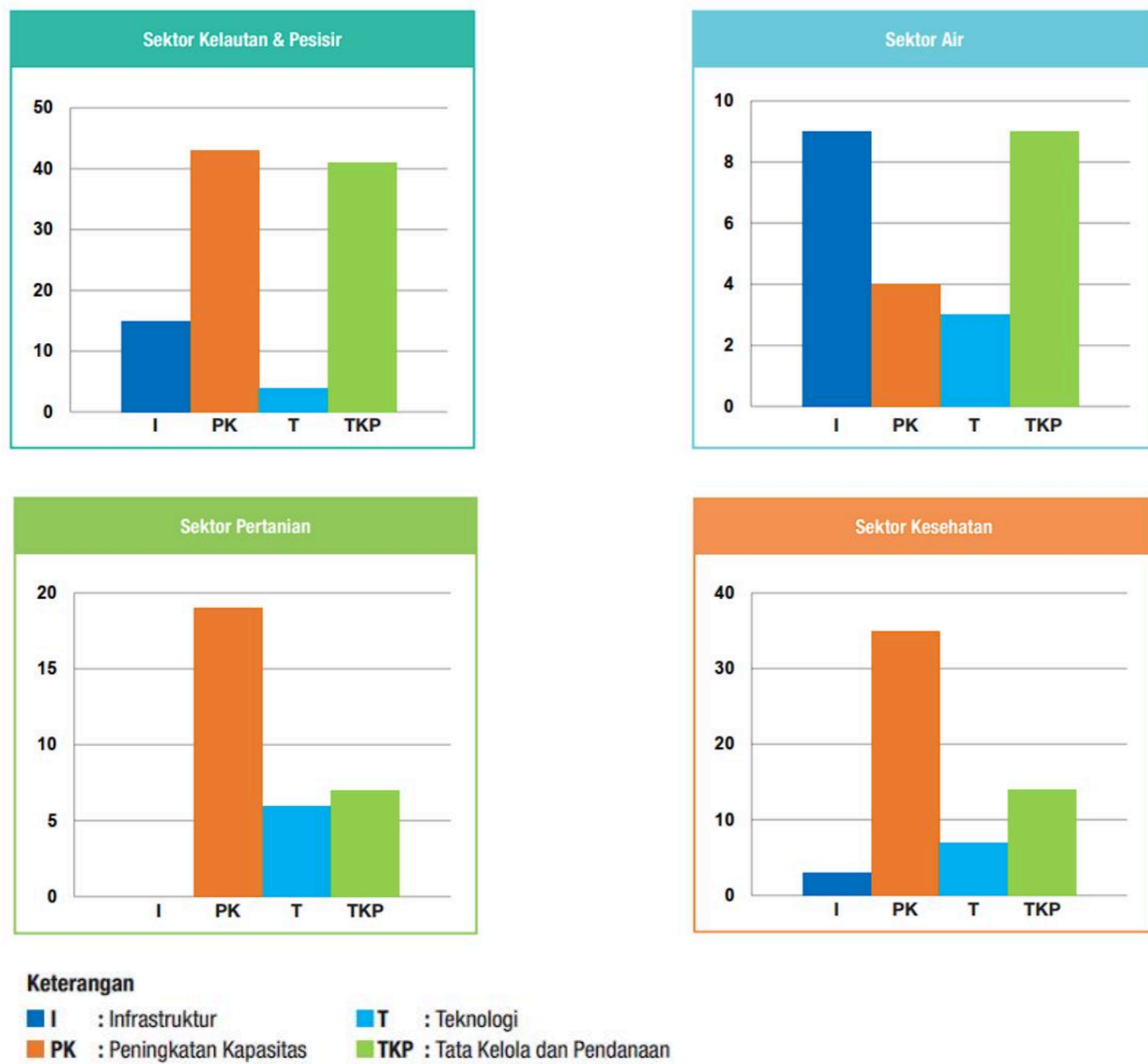




2. KEGIATAN LEMBAGA
NONPEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM

Sejak perubahan iklim menjadi isu dan perhatian global, lembaga nonpemerintah telah banyak mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim, diantaranya adalah rehabilitasi mangrove di Pantai Utara Kotamadya Semarang pada 1996 yang dilakukan oleh Yayasan Bina Karta Lestari dan di Kabupaten Indramayu, Jawa barat oleh Yayasan Lahan Basah/Wetlands pada tahun 1998. Komitmen nasional juga semakin terlihat secara nyata sejak dikeluarkannya Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) pada tahun 2010. Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen integrasi perubahan iklim dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah telah menasar pada empat sektor prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, air, dan kesehatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa lembaga nonpemerintah yang menasar intervensi pada aspek tata kelola dan pendanaan ketahanan iklim secara umum sehingga tidak berfokus pada sektor tertentu secara spesifik. Pendekatan kegiatan dan program yang dilakukan telah mencakup keseluruhan pendekatan yang dirumuskan pada pembangunan berketahanan iklim sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Proporsi Lembaga Nonpemerintah pada Sektor Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim

Tabel 1. Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim

No	Nama Instansi/Organisasi	Kelautan dan Pesisir				Air				Pertanian				Kesehatan				Lintas Sektor				
		I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	
1	GIZ Climb, CLARITY and GET				✓						✓											
2	GAIN										✓		✓									
3	ICLEI		✓				✓												✓		✓	
4	Kawung Pitu Institute		✓																			
5	Kemitraan	✓			✓	✓		✓				✓										
6	Kepalangmerahan	✓	✓✓	✓	✓										✓		✓		✓	✓	✓	
7	KIAT					✓																
8	KONSEPSI				✓						✓		✓		✓				✓		✓	
9	LAMFI													✓	✓		✓					
10	LTKL																		✓		✓	
11	LPBI NU	✓	✓			✓								✓	✓							
12	Mercy Corps Indonesia		✓	✓	✓✓	✓			✓		✓	✓	✓									
13	Oxfam								✓		✓		✓									
14	Penabulu Foundation				✓		✓		✓													✓
15	LLHPB PP Aisyiyah	✓									✓				✓							✓
16	MLH PP Muhammadiyah					✓																
17	PT Astra Agro Lestari								✓		✓	✓										
18	PT Asuransi Central Asia										✓											
19	RARE Indonesia		✓		✓																	
20	Save The Children																			✓		✓
21	UCLG ASPAC																					✓
22	UNICEF						✓	✓	✓						✓	✓			✓		✓	
23	World Health Organization														✓	✓	✓					
24	World Resources Institute				✓																	
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)				✓			✓	✓		✓								✓	✓		

No	Nama Instansi/Organisasi	Kelautan dan Pesisir				Air				Pertanian				Kesehatan				Lintas Sektor			
		I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF	I	CB	T	GF
26	World Wildlife Fund (WWF)												✓						✓		✓
27	Yayasan Bina Karta Lestari	✓	✓		✓	✓								✓	✓	✓	✓				
28	Yayasan BUMN		✓		✓	✓															✓
29	YKAN		✓		✓		✓												✓		✓
30	Yayasan Konservasi Indonesia				✓				✓				✓								
31	Yayasan Lahan Basah (YLBA)	✓																	✓		
32	Yayasan Madani Berkelanjutan		✓									✓									
33	UNDP				✓				✓												✓

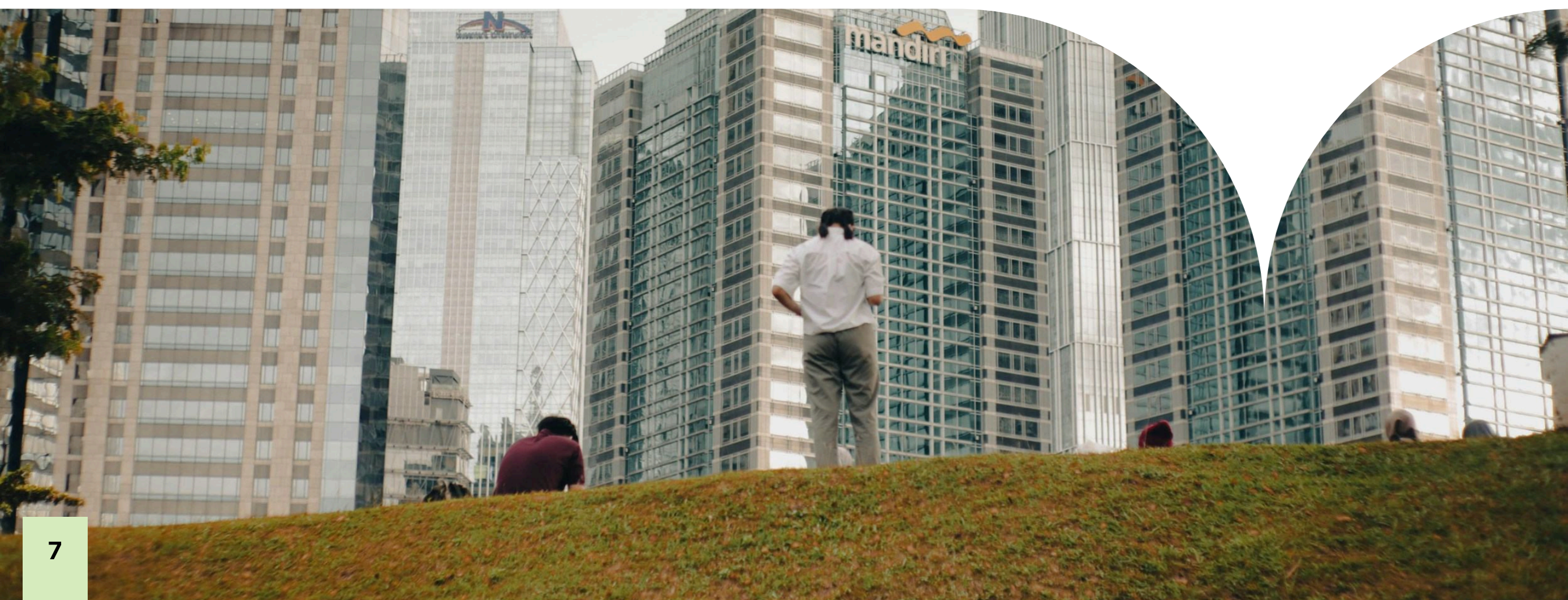
Keterangan

I : Infrastruktur

T : Teknologi

PK : Peningkatan Kapasitas

TKP : Tata Kelola dan Pendanaan





3. LOKASI KEGIATAN LEMBAGA NONPEMERINTAH

Dalam menyusun intervensi yang dilakukan, Kementerian PPN/Bappenas telah mengidentifikasi lokasi prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim pada tingkat nasional yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas. Untuk mengidentifikasi kegiatan yang bersifat business as usual dengan kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim, dilakukan proses overlay kegiatan lembaga nonpemerintah dengan lokasi prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim sebagaimana dapat dilihat pada

gambar dan tabel di bawah. Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi prioritas yang telah menjadi sasaran implementasi intervensi maupun lokasi yang belum banyak mendapatkan intervensi. Dengan demikian, informasi ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan dalam mengarahkan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi tingkat kerentanan komunitas sekaligus mendukung capaian target Pembangunan Berketahanan Iklim di Indonesia.



Gambar 3. Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Kelautan dan Pesisir

Tabel 2. Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Kelautan dan Pesisir

Prioritas		Provinsi/Kabupaten	Kelautan dan Pesisir (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
K	P		I	PK	T	TKP	
		Nasional		5		8	1, 6, 12, 33
		Provinsi Aceh				1	30
		Provinsi Sumatera Utara	1			1	31, 30
		Tapanuli Selatan	1				31
TP	P	Nias Utara				1	30
		Provinsi Sumatera Barat				2	24, 30
		Provinsi Riau		1			32
		Provinsi Bengkulu				1	30
		Provinsi Lampung		1	1	2	28, 30
SP	P	Tanggamus		5	1	2	6
		Provinsi Kep. Bangka Belitung		1			29
		Provinsi Kep. Riau					
TP	P	Bintan				1	30
TP	P	Kepulauan Anambas		4			4
		Provinsi DKI Jakarta	1	1		1	11, 31, 24
		Kota Jakarta Utara				1	25
		Provinsi Jawa Barat	1	1			11
		Provinsi Jawa Tengah	1			3	11, 12
TP	TP	Demak	2			2	31, 5, 12
		Semarang		1			29
TP	TP	Batang				1	5
TP	TP	Pekalongan	7	3	2	6	5, 27, 12
P	P	Tegal				1	5
TP	P	Kota Semarang	1			1	27, 12
TP	TP	Kota Pekalongan	1		2	3	27, 12
		Provinsi DI Yogyakarta	1				11
		Provinsi Jawa Timur		4			11
SP	P	Banyuwangi				1	30
SP	SP	Probolinggo		3			6
TP	P	Kota Surabaya				1	25
		Provinsi Banten	1			1	30, 11
		Provinsi Bali		10		2	11, 28, 32, 24

Keterangan:

K : Kelautan
P : Pesisir
I : Infrastruktur
PK : Peningkatan Kapasitas
T : Teknologi
TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

SP Super Prioritas
TP Top Prioritas
P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
1	GIZ
4	Kawung Pitu Institute
5	Kemitraan
6	Kepalangmerahan
8	KONSEPSI
11	LPBI NU
12	Mercy Corps Indonesia
14	Penabulu Foundation
19	RARE Indonesia
24	World Resources Institute
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
27	Yayasan Bina Karta Lestari
28	Yayasan BUMN
29	YKAN
30	Yayasan Konservasi Indonesia
31	Yayasan Lahan Basah (YLBA)
32	Yayasan Madani Berkelanjutan
33	UNDP

Prioritas		Provinsi/Kabupaten	Kelautan dan Pesisir (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
K	P		I	PK	T	TKP	
		Provinsi Sulawesi Tenggara					
TP	P	Buton		1		1	19
TP	P	Muna		1		1	19
TP		Konawe					
TP	P	Kolaka					
TP		Konawe Selatan		1		1	19
TP	P	Bombana		1		1	19
TP	P	Wakatobi		2		1	29
TP		Kolaka Utara				1	
TP	P	Buton Utara		1		1	19
TP		Konawe Utara		1			19
		Kolaka Timur					
TP	P	Konawe Kepulauan		1		1	19
TP	P	Muna Barat		1		1	19
TP	SP	Buton Tengah		1		1	19
TP		Buton Selatan		1		1	19
		Provinsi Gorontalo	1				11
		Provinsi Maluku		4		1	19, 31, 30
	P	Maluku Tengah	1				5
TP	P	Buru Selatan	1	5	1	2	6
		Provinsi Maluku Utara		1			19
		Provinsi Papua Barat					
		Fakfak				1	30
TP	P	Kaimana				2	30
		Provinsi Papua Barat Daya					
TP	P	Raja Ampat		2		2	29, 30
TP	P	Sorong		2		1	29
SP		Tambrau		2		1	29
TP	P	Kota Sorong		1			29

Keterangan:

K : Kelautan
P : Pesisir
I : Infrastruktur
PK : Peningkatan Kapasitas
T : Teknologi
TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

SP Super Prioritas
TP Top Prioritas
P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
1	GIZ
4	Kawung Pitu Institute
5	Kemitraan
6	Kepalangmerahan
8	KONSEPSI
11	LPBI NU
12	Mercy Corps Indonesia
14	Penabulu Foundation
19	RARE Indonesia
24	World Resources Institute
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
27	Yayasan Bina Karta Lestari
28	Yayasan BUMN
29	YKAN
30	Yayasan Konservasi Indonesia
31	Yayasan Lahan Basah (YLBA)
32	Yayasan Madani Berkelanjutan
33	UNDP

Prioritas		Provinsi/Kabupaten	Kelautan dan Pesisir (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
K	P		I	PK	T	TKP	
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	1				11
SP	P	Lombok Timur				2	8, 25
SP	P	Sumbawa				1	30
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	4			11, 27, 29
TP		Sumba Timur		1		1	14, 30
TP	P	Kupang		1			14
TP	SP	Alor				1	30
	SP	Lembata		1		1	14
	SP	Manggarai	1	6	1	1	6
TP	P	Rote Ndao		1			14
		Provinsi Kalimantan Barat		1			32
		Provinsi Kalimantan Selatan	1				11
		Provinsi Kalimantan Timur	2				11, 31
TP		Berau		1		1	29
		Provinsi Kalimantan Utara	2				31
		Provinsi Sulawesi Utara					
TP	P	Bolaang Mongondow		1		1	19
TP	TP	Minahasa		1		1	19
	TP	Kepulauan Sangihe		1		1	19
	P	Minahasa Selatan		1		1	19
TP	P	Minahasa Utara		1		1	19
TP	P	Bolaang Mongondow Utara		1		1	19
		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		1		1	19
	SP	Minahasa Tenggara		1		1	19
TP	P	Bolaang Mongondow Selatan		1		1	19
TP	P	Bolaang Mongondow Timur		1		1	19
		Provinsi Sulawesi Tengah		1			32
TP	P	Donggala				1	30
		Provinsi Sulawesi Selatan	1				11

Keterangan:

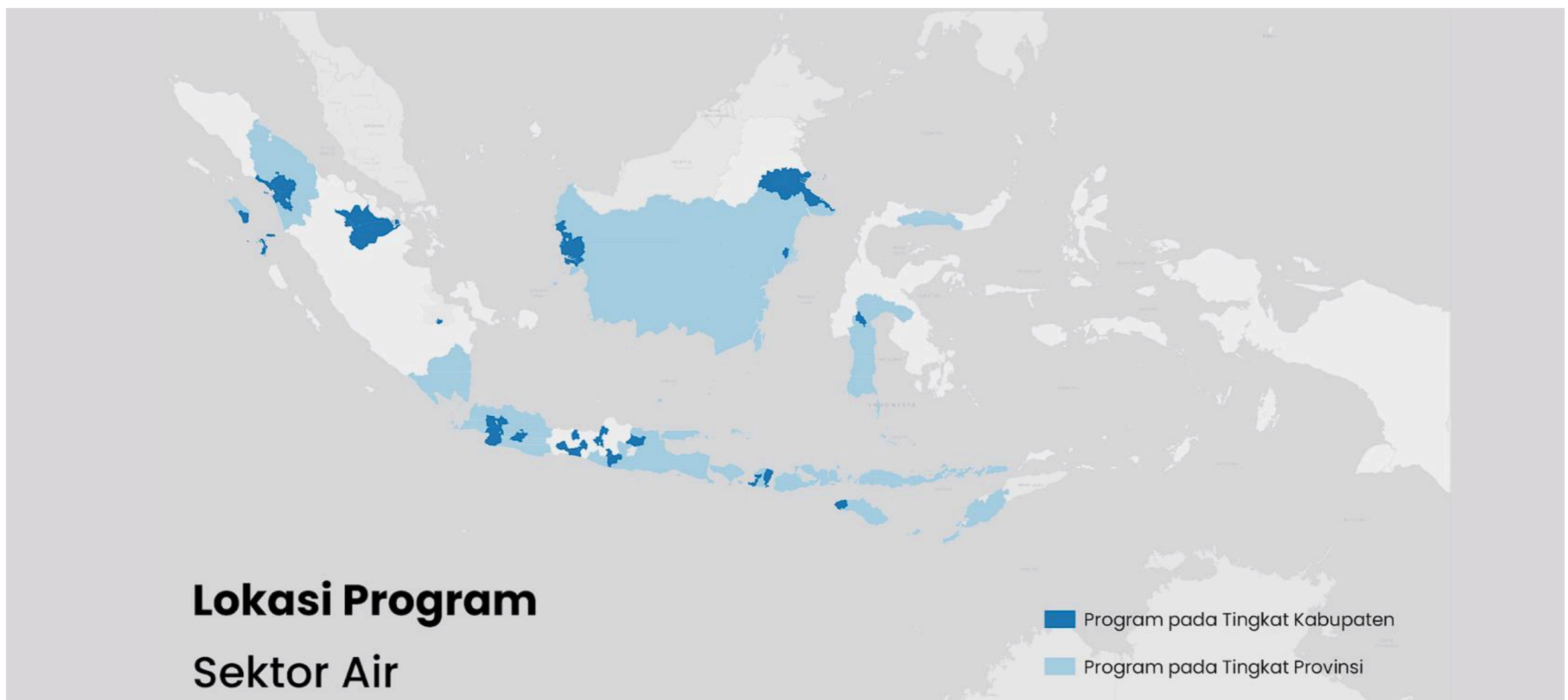
K : Kelautan
P : Pesisir
I : Infrastruktur
PK : Peningkatan Kapasitas
T : Teknologi
TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

SP Super Prioritas
TP Top Prioritas
P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
1	GIZ
4	Kawung Pitu Institute
5	Kemitraan
6	Kepalangmerahan
8	KONSEPSI
11	LPBI NU
12	Mercy Corps Indonesia
14	Penabulu Foundation
19	RARE Indonesia
24	World Resources Institute
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
27	Yayasan Bina Karta Lestari
28	Yayasan BUMN
29	YKAN
30	Yayasan Konservasi Indonesia
31	Yayasan Lahan Basah (YLBA)
32	Yayasan Madani Berkelanjutan
33	UNDP



Gambar 4. Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Air

Tabel 3. Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Air

Lokpri			Provinsi/Kabupaten	Air (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
B	K	TL		I	PK	T	TKP	
			Nasional	1	4	3	2	17, 22
			Provinsi Sumatera Utara	1				16
		TP	Tapanuli Selatan				1	30
SP	SP	SP	Tapanuli Tengah				1	30
	SP	SP	Tapanuli Utara				1	30
		SP	Nias Selatan				1	25
			Provinsi Riau					
	SP		Pelalawan	1				15
		TP	Siak	1				15
TP			Kota Pekanbaru	1				15
			Provinsi Sumatera Selatan					
TP	TP		Kota Palembang	1				7
			Provinsi Lampung	1				28
			Provinsi DKI Jakarta	1				11
P	P		Kota Jakarta Selatan				1	6

Keterangan:

- B : Banjir
- K : Kekeringan
- TL : Tanah Longsor
- I : Infrastruktur
- PK : Peningkatan Kapasitas
- T : Teknologi
- TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

- SP Super Prioritas
- TP Top Prioritas
- P Prioritas

Lokpri			Provinsi/Kabupaten	Air (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
B	K	TL		I	PK	T	TKP	
			Provinsi Jawa Barat	1				11
	TP		Bogor				1	6
	TP	TP	Sukabumi				1	6
TP	P		Bandung	1			1	6, 7
			Provinsi Jawa Tengah					
TP	TP	P	Banyumas	1				7
SP	SP		Kebumen	1				7
TP	TP		Wonosobo	1				7
P	P		Sukoharjo	1				15
P	P		Wonogiri				1	6
TP	P		Demak	1				15
TP	P		Semarang	1				27
SP	TP		Pekalongan	3			2	27, 12
P	P		Kota Surakarta				1	6
TP	TP		Kota Pekalongan	1			1	12
			Provinsi DI Yogyakarta	2				11, 16
			Provinsi Jawa Timur	1				11
SP	SP		Bojonegoro				1	6
			Provinsi Banten	1				11
			Provinsi Bali	1				28
			Provinsi Nusa Tenggara Barat	3	1			11, 16, 18, 14
SP	TP		Lombok Barat				1	14
TP	TP		Lombok Timur				1	14
			Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	11, 14, 13
TP	SP		Sumba Barat Daya			1		25
			Provinsi Kalimantan Barat				1	33
SP	SP		Mempawah	1				15
SP	SP		Kubu Raya	1				15
			Provinsi Kalimantan Tengah	1				16
			Provinsi Kalimantan Selatan	1			1	11, 33

Keterangan:

B : Banjir
K : Kekeringan
TL : Tanah Longsor
I : Infrastruktur
PK : Peningkatan Kapasitas
T : Teknologi
TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

SP Super Prioritas
TP Top Prioritas
P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
5	Kemitraan
6	Kepalangmerahan
7	KIAT
11	LPBI NU
12	Mercy Corps Indonesia
13	Oxfam
14	Penabulu Foundation
15	PP Aisyiyah
16	PP Muhammadiyah
17	PT Astra Agro Lestari
18	PT Asuransi Central Asia
22	UNICEF
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
27	Yayasan Bina Karta Lestari
28	Yayasan BUMN
29	YKAN
30	Yayasan Konservasi Indonesia
33	UNDP

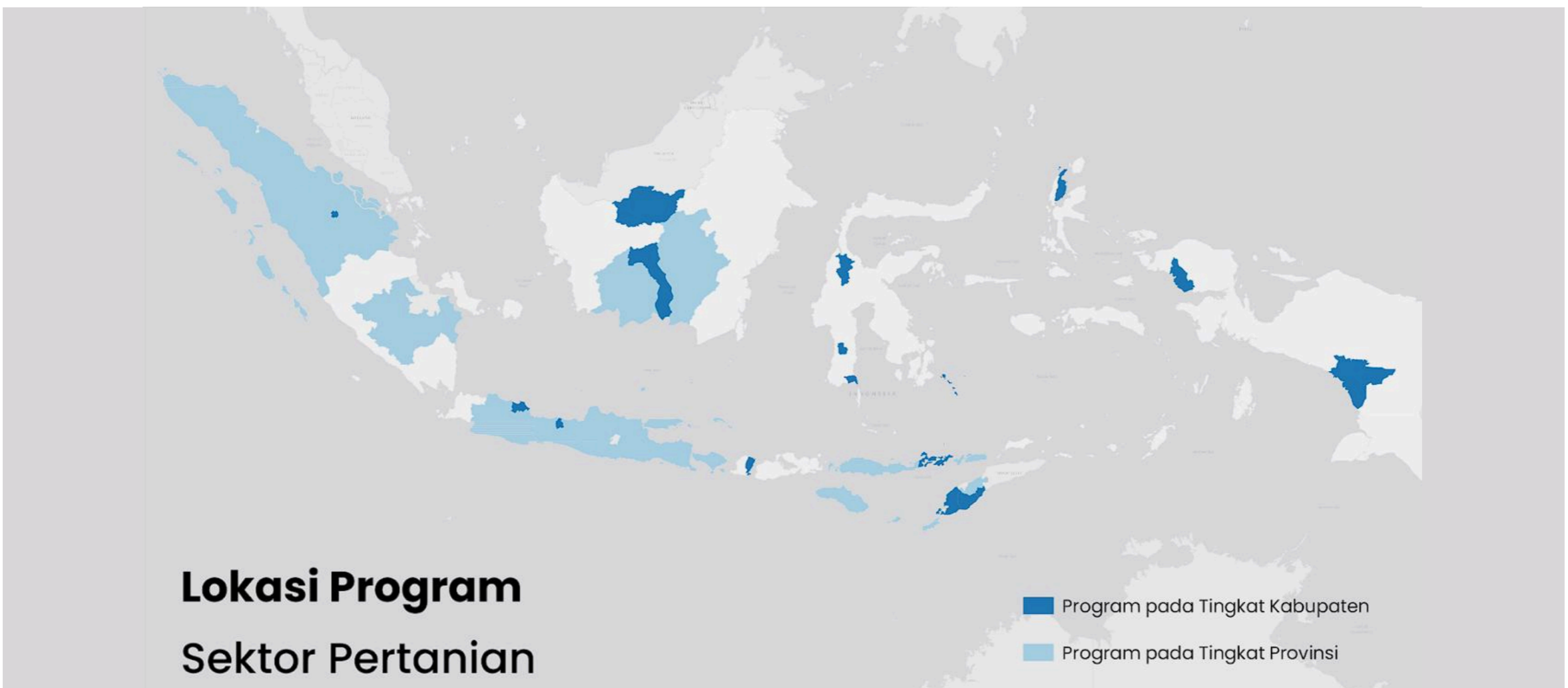
Lokpri			Provinsi/Kabupaten	Air (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
B	K	TL		I	PK	T	TKP	
			Provinsi Kalimantan Timur	2			1	11, 16, 33
		TP	Berau		1			29
TP	P	P	Kota Samarinda	1				5
			Provinsi Sulawesi Selatan	1				11
		SP	Toraja Utara			1		5
	SP		Provinsi Gorontalo	1				11

Keterangan:

- B : Banjir
- K : Kekeringan
- TL : Tanah Longsor
- I : Infrastruktur
- PK : Peningkatan Kapasitas
- T : Teknologi
- TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

- SP Super Prioritas
- TP Top Prioritas
- P Prioritas



Gambar 5. Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Pertanian

Tabel 4. Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Pertanian

Lokpri					Provinsi/Kabupaten	Pertanian (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
PB	PK	PO	C	B		I	PK	T	TKP	
					Nasional		3		1	2, 15
					Provinsi Aceh		1			2
					Provinsi Sumatera Utara				1	18
					Provinsi Sumatera Barat		1			2
					Provinsi Riau		1			34
				TP	Kota Pekanbaru		2			34
					Provinsi Sumatera Selatan				1	18

Keterangan:

- PB : Padi-Banjir
- PK : Padi-Kekeringan
- PO : Padi-OPT
- C : Cabai
- B : Bawang Merah
- I : Infrastruktur
- PK : Peningkatan Kapasitas
- T : Teknologi
- TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

- SP Super Prioritas
- TP Top Prioritas
- P Prioritas

Lokpri					Provinsi/Kabupaten	Pertanian (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
PB	PK	PO	C	B		I	PK	T	TKP	
					Prov. Jawa Barat		2		1	2, 34, 18
TP	P	P			Indramayu		1			1
					Prov. Jawa Tengah		1	1	1	34, 18
SP	SP	TP	SP		Pekalongan	3	2			12
					Kota Pekalongan		2			12
					Prov. DI Yogyakarta		1			2
					Prov. Jawa Timur		1	1	1	34, 18
					Prov. Bali		1			34
					Prov. Nusa Tenggara Barat					
	TP		TP		Lombok Timur				2	8, 13
					Prov. Nusa Tenggara Timur		1		1	1, 13
					Kupang		2			25, 34
SP	SP		SP		Timor Tengah Selatan		1			13
					Lembata				1	13
TP	TP				Flores Timur				1	13
SP	SP		SP		Malaka		1			13
					Prov. Kalimantan Barat					
SP		SP			Kapuas Hulu			1		32
					Prov. Kalimantan Tengah					16
		SP			Katingan				1	26
					Prov. Sulawesi Tengah					
TP	TP	TP	TP		Sigi		4	1		12, 25
					Prov. Sulawesi Selatan					
TP	TP				Bulukumba			2		5
SP	SP		SP		Soppeng		1			34
					Prov. Sulawesi Tenggara					
			SP		Wakatobi				1	29
					Prov. Maluku Utara					
	TP				Halmahera Utara		1			25
					Prov. Papua Barat Daya					
			SP		Sorong Selatan				1	30
					Prov. Papua Selatan					
					Asmat		1			25

Keterangan:

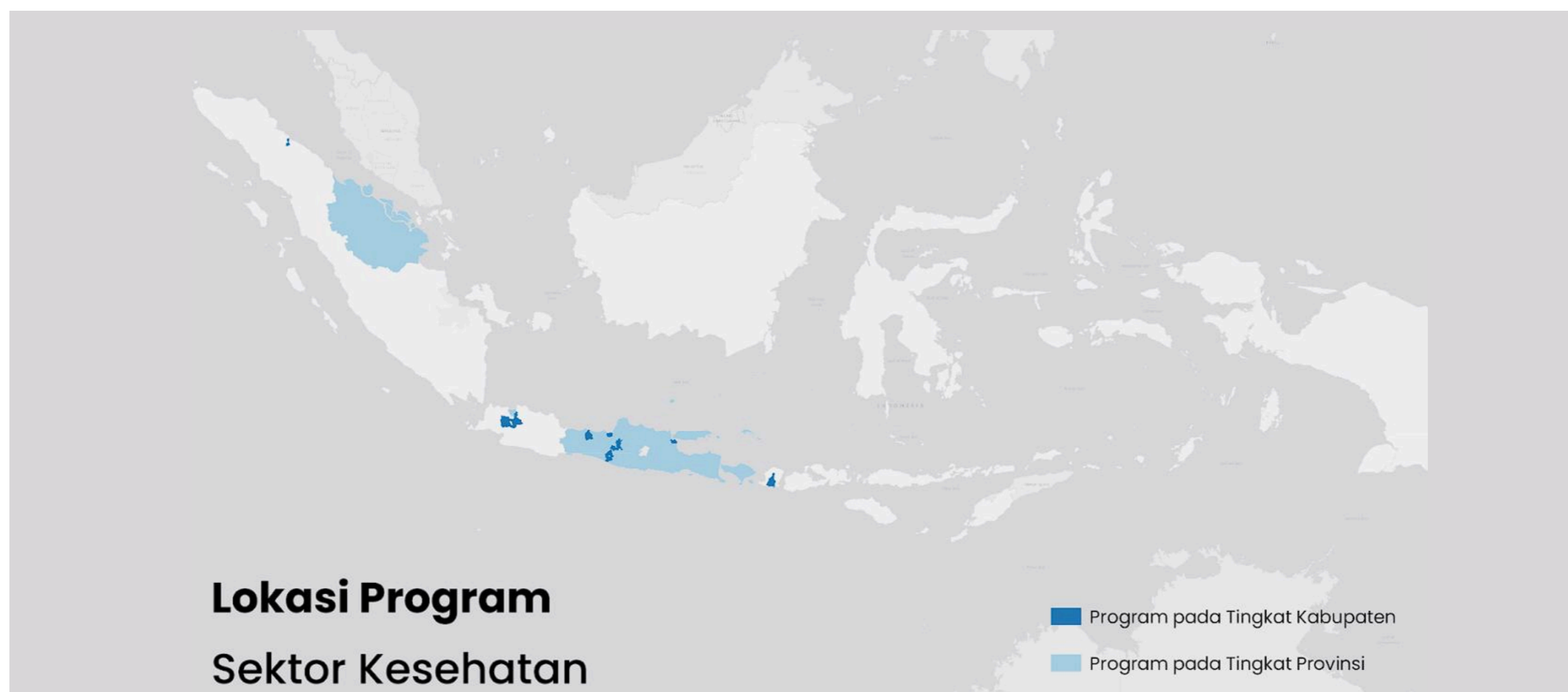
- PB : Padi-Banjir
- PK : Padi-Kekeringan
- PO : Padi-OPT
- C : Cabai
- B : Bawang Merah
- I : Infrastruktur
- PK : Peningkatan Kapasitas
- T : Teknologi
- TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

- SP Super Prioritas
- TP Top Prioritas
- P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
1	GIZ
2	GAIN
5	Kemitraan
8	KONSEPSI
12	Mercy Corps Indonesia
13	Oxfam
15	PP Aisyiyah
16	PP Muhammadiyah
18	PT Asuransi Central Asia
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
25	Wahana Visi Indonesia (WVI)
26	World Wildlife Fund (WWF)
29	YKAN
30	Yayasan Konservasi Indonesia
32	Yayasan Madani Berkelanjutan
34	Adakarbon



Gambar 6. Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Sektor Kesehatan

Tabel 5. Rekapitulasi Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Sektor Kesehatan

Lokpri				Provinsi/Kabupaten	Kesehatan (Jumlah Program)				Lembaga Nonpemerintah
DBD	M	P	D		I	PK	T	TKP	
				Nasional		8	2	2	22, 23
				Prov. Sumatera Utara					
TP			P	Kota Medan		2		2	6
				Prov. Riau		1			23
				Prov. DKI Jakarta		3			23
				Prov. Jawa Barat					
TP		SP	P	Bogor		1			6
TP		P	P	Kota Bekasi		1			23
				Prov. Jawa Tengah		1			15
TP		P	P	Boyolali	1				6
		P	P	Pekalongan		1			27
P		TP	P	Kota Surakarta		1			23
P		P	P	Kota Semarang		1			27
				Prov. DI Yogyakarta		2			23
P		P	TP	Bantul		1			23
P		TP	TP	Sleman		1			23
				Prov. Jawa Timur		1			15
P		P	P	Kota Surabaya		2		2	6
				Prov. Bali		1			6
				Prov. Nusa Tenggara Barat					
		P	P	Lombok Tengah		1			8

Keterangan:

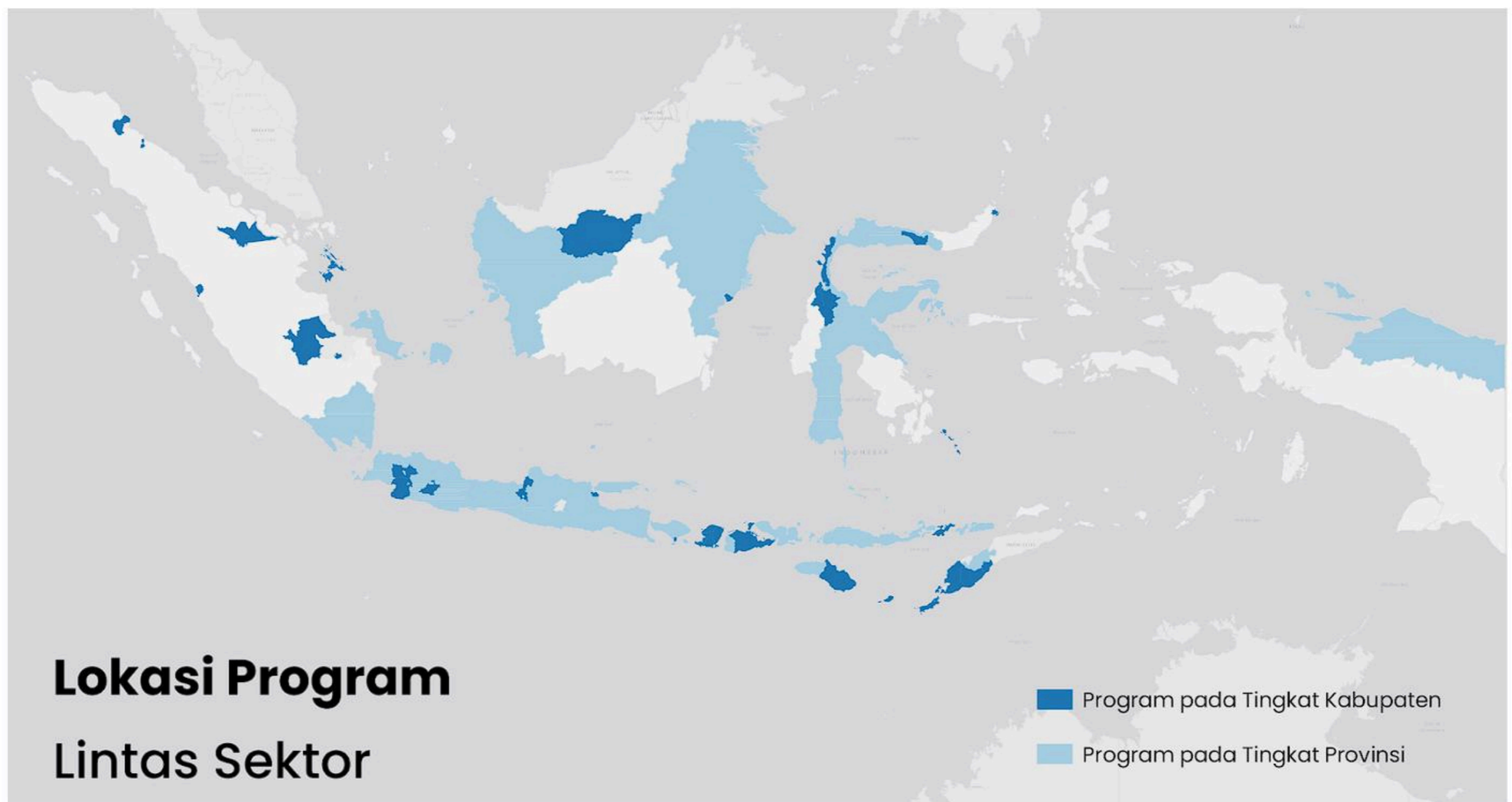
- DBD : Demam Berdarah Dengue
- M : Malaria
- P : Pneumonia
- D : Diare
- I : Infrastruktur
- PK : Peningkatan Kapasitas
- T : Teknologi
- TKP : Tata Kelola dan Pendanaan

Level Prioritas Kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim:

- SP Super Prioritas
- TP Top Prioritas
- P Prioritas

Kode Lembaga Nonpemerintah

Legenda	Lembaga Nonpemerintah
22	UNICEF
23	World Health Organization
6	Kepalangmerahan
15	PP Aisyiyah
27	Yayasan Bina Karta Lestari
8	KONSEPSI



Gambar 7. Lokasi Program Lembaga Nonpemerintah Lintas Sektor





4. PROFIL LEMBAGA
NONPEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM

Profil lembaga nonpemerintah diharapkan dapat menjadi informasi penting dalam memudahkan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga terutama dalam melakukan aksi konvergensi pembangunan berketahanan iklim. Dengan demikian, dapat terjalin

komunikasi yang berkelanjutan dan menjadi penghubung berlangsungnya *matchmaking* kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan pada penerima manfaat aksi pembangunan berketahanan iklim.

GIZ Climb, CLARITY, Green Economy Transformation (GET) 4.0		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
<p>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) merupakan badan Pemerintah Jerman yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas, kerja sama luar negeri dalam bentuk bantuan pembangunan. GIZ pertama kali bekerja di Indonesia pada tahun 1975, melalui berbagai negosiasi sejak 2013 terjalin kerja sama bilateral yang berfokus pada tiga fokus pembangunan, yaitu energi dan perubahan iklim, pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan pemerintahan yang baik dan jejaring global.</p>	<p>Climate and Biodiversity</p>	<p>GIZ Climb banyak berperan dalam mendukung penyusunan kajian terkait Pembangunan Berketahanan Iklim yang berkontribusi dalam pengembangan kebijakan nasional maupun peningkatan tata kelola dan pendanaan pembangunan berketahanan iklim.</p>
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
<p>Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) berdiri pada Konferensi PBB tahun 2002 untuk mengatasi penderitaan manusia yang disebabkan oleh kurangnya gizi. GAIN adalah yayasan global berbasis di Swiss, yang memobilisasi kemitraan publik- swasta dan memberikan dukungan dana dan teknis untuk memberikan makanan bergizi kepada orang-orang yang paling berisiko kekurangan gizi.</p> <p>Di Indonesia, GAIN berkontribusi untuk mengatasi malnutrisi melalui model program yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau di antara masyarakat yang rentan terhadap malnutrisi melalui jalinan kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta.</p> <p>Di Indonesia, GAIN hadir sejak 2013 melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI yang meliputi program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortifikasi minyak goreng dengan Vitamin A dan iodisasi garam 2. Perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan 3. Perbaikan gizi remaja melalui edukasi gizi remaja 4. Peningkatan akses pangan bergizi melalui pengurangan susut pasca panen dan tata kelola gizi perkotaan 5. Peningkatan lingkungan kondusif untuk konsumsi gizi seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Environment, climate, and food-nutrition systems • Food governance • Food culture • Social protection and nutrition • Work force nutrition 	<p>Di sektor pangan, mendukung regulasi, studi, dan pilot program pengembangan pangan lokal sehat ramah lingkungan dan (berketahanan) iklim; serta kampanye konsumsi pangan lokal tersebut.</p>

ICLEI – Local Governments for Sustainability		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
ICLEI merupakan jaringan lembaga global yang bergerak dalam rangka kerja sama, peningkatan kapasitas dari 2500 pemerintah regional dan lokal yang berkomitmen terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan. ICLEI – Local Governments for Sustainability berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan yang berkelanjutan dengan menggerakkan aksi lokal untuk pembangunan yang mengarah pada emisi rendah, berbasis alam, berkeadilan, berketahanan, dan sirkular.	ICLEI memberikan pendampingan terhadap anggota pemerintah lokal melalui penyusunan dan pengarusutamaan program yang mendukung peningkatan ketahanan dan keberlanjutan pada tingkat lokal. Berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah lokal dengan para pakar, aktor industri, akademisi, agensi nasional serta internasional dalam rangka memperluas jejaring untuk menemukan potensi solusi bagi tantangan perkotaan.	Upaya penguatan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemimpin daerah dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan. Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan pelatihan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dalam isu ketahanan iklim dan inklusivitas keterlibatan kelompok rentan.
Kawungpitu Institute		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Kawungpitu didirikan oleh sekelompok orang muda yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat di Bogor, Jawa Barat. Kawungpitu adalah organisasi for nonprofit yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkelanjutan berdasar pengetahuan, kearifan, dan potensi lokal melalui tiga pilar, yaitu pengelolaan sumber daya yang bijaksana, penguatan kapabilitas komunitas, dan peningkatan resiliensi komunitas di tengah krisis iklim.	Kawungpitu menggunakan beberapa strategi kunci untuk mencapai tujuannya, yaitu pengorganisasian komunitas, pengembangan komunitas, peningkatan kapasitas komunitas, riset partisipatif, advokasi, dan melakukan modelling. Kawungpitu memulai kontribusi pada isu ketahanan iklim dengan riset partisipatif yang dilanjutkan pengorganisasian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas komunitas, hingga melakukan modelling. Lokasi intervensi Kawungpitu dalam kegiatan iklim berada di Kab. Bogor, Jawa Barat dan Kab. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau	Kegiatan ketahanan iklim yang dilakukan Kawungpitu adalah dengan melakukan riset partisipatif, pengorganisasian, pengembangan, peningkatan kapasitas komunitas, hingga modelling bersama masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Mereka juga menggali pengetahuan lokal komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kesadaran komunitas terhadap krisis iklim, dan mendorong terciptanya mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan bagi komunitas. Pada sektor pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Kawungpitu menginventarisasi praktik lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai bentuk mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada sektor pesisir dan kelautan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kawungpitu mendorong terbentuknya model kehidupan alternatif bagi masyarakat pesisir dengan memanfaatkan ekosistem mangrove melalui pendekatan silvofishery. Bersamaan dengan itu, Kawungpitu juga mendorong peningkatan sensitivitas komunitas pesisir terhadap ekosistem mangrove yang memiliki peran dan fungsi vital pada kawasan pesisir.
Kemitraan		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Merupakan lembaga independen yang memfasilitasi proses reformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dalam prosesnya, Kemitraan melibatkan berbagai pihak meliputi pemerintah, aktor politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kemitraan memiliki tujuan utama pada penguatan kapasitas organisasi dalam mendorong praktik tata kelola yang lebih baik di Indonesia.	Berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dengan mempromosikan peningkatan pelayanan umum dan integritas lembaga, meningkatkan inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kolaborasi wilayah	Kemitraan berkontribusi dalam melakukan intervensi peningkatan ketahanan pada empat sektor prioritas pembangunan berketahanan iklim, utamanya banyak dilakukan pada sektor kelautan dan pesisir. Pendekatan yang dilakukan meliputi infrastruktur, teknologi, serta tata kelola dan pendanaan.

Kepalangmerahan (PMI, IFRC, AmRC)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Merupakan organisasi jaringan lembaga internasional yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jangka panjang, program pembangunan, dan tanggap bencana. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2018, Organisasi Kepalangmerahan berperan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial, berupa bantuan kepada korban kerusakan, gangguan lainnya serta melakukan manajemen bencana baik di dalam negeri maupun internasional.	Kepalangmerahan banyak bergerak pada bidang kelautan dan pesisir, kesehatan, dan kegiatan pengurangan risiko bencana secara umum.	Kepalangmerahan berperan dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan kajian yang berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan serta peningkatan tata kelola dan pendanaan.

KIAT		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) adalah kemitraan 10 tahun antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur bagi semua orang.	KIAT bekerja sama dengan mitra pemerintah, bank pembangunan multilateral (MDB), dan masyarakat sipil dalam memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan, dan penyediaan infrastruktur. KIAT juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja dan perencanaan infrastruktur. Melalui kerja samanya dengan pemerintah pusat dan daerah, KIAT berupaya mencapai 5 End-of-Facility Outcomes (EOFOs): salah satu EOFOs adalah peningkatan kebijakan, perencanaan, dan desain yang menghasilkan infrastruktur dengan emisi rendah dan ketahanan iklim.	Di bidang perubahan iklim, KIAT mendukung pemerintah Indonesia melalui kolaborasi dalam menilai dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur Indonesia, serta mengembangkan perangkat untuk memperkirakan gas rumah kaca dan menilai materialitas ESG untuk pengembangan proyek. KIAT meningkatkan persiapan proyek dengan mengintegrasikan pertimbangan iklim selama persiapan proyek.

Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Konsepsi merupakan lembaga yang muncul dengan tujuan merespon berbagai dinamika masyarakat dan masalah pembangunan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya terkait isu kemiskinan, ketidakadilan, demokrasi, partisipasi masyarakat, masalah lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini memiliki visi untuk menjadi pusat keunggulan bagi transformasi sosial yang berkeadilan.	Konsepsi bergerak di bidang riset dan kajian lingkungan dan kebijakan publik. Konsepsi memulai kontribusinya dalam ketahanan iklim pada tahun 2015 dengan mayoritas kegiatannya berada di keempat sektor prioritas ketahanan iklim, beberapa di sektor air, dan sebagian di sektor kesehatan. Bentuk- bentuk kegiatan yang dilakukan juga mayoritas berupa peningkatan kapasitas dan sebagian lainnya berupa tata kelola dan pendanaan. Lokasi intervensi Konsepsi dalam kegiatan ketahanan iklim hanya di sekitar Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Bentuk-bentuk kegiatan ketahanan iklim yang dilakukan oleh Konsepsi di keempat sektor, yaitu pembangunan ketangguhan UMKM dalam memahami dampak bencana di Kota Mataram, penguatan ketangguhan masyarakat pedesaan dan perkotaan di Kab. Lombok Timur, penguatan kelompok kerja adaptasi perubahan iklim di Kab. Lombok Timur, bantuan modal kerja/keterampilan kepada masyarakat terkena bencana, pengembangan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Di sektor air, kegiatannya berupa pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat di wilayah Rinjani Timur, peningkatan fungsi layanan ekosistem hutan, dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sementara itu, kegiatan ketahanan iklim yang dilakukan oleh Konsepsi di sektor kesehatan adalah penguatan kebijakan ketahanan pangan dan gizi, penguatan kesehatan ibu dan anak, serta pelaksanaan program STBM.

LAMFI (Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
LAMFI merupakan lembaga profesional, independen, dan non profit yang menyelenggarakan akreditasi terhadap Puskesmas, Klinik, Laboratorium kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (UTD) yang diresmikan sejak Januari 2023. LAMFI bertujuan untuk mendukung peningkatan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima dan peningkatan mutu melalui peningkatan pelayanan promotif dan preventif yang sesuai dengan standar dalam upaya mendukung perwujudan universal health coverage untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	LAMFI berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan sektor prioritas kesehatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur fasilitas kesehatan tangguh iklim, melakukan kajian kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim untuk mendukung penguatan kebijakan dan tata kelola, serta peningkatan kapasitas melalui promosi dan edukasi kesehatan.
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia. NU didirikan tahun 1926 oleh kyai (ulama) yang berpengaruh di Indonesia. Saat ini NU memiliki 100 juta anggota yang mayoritas berada di daerah pedesaan dan memiliki struktur organisasi dari tingkat nasional sampai ke pedesaan, seperti pendakwah, guru, nelayan, petani, pedagang, dan di pemerintahan seperti di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. LPBI NU adalah lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan. Pembentukan LPBI NU disepakati pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010. Semangat ini kemudian dikukuhkan dan ditetapkan dalam rapat pleno harian PBNU untuk membentuk LPBI NU. Setelah Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang tahun 2015 dibentuk kepengurusan baru PP. LPBI NU berdasarkan SK No. 19/A. II.04/09/2015	LPBI NU memiliki pembidangan dalam struktur kepengurusan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Riset & Pengembangan • Kelembagaan & Advokasi Kebijakan • Pengelolaan Risiko Bencana • Tanggap Darurat & Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana • Knowledge Management & Networking • Pengendalian Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan. 	LPBI NU berkontribusi dalam program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan melalui kajian dan riset, advokasi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan pendampingan, penguatan koordinasi stakeholder, penguatan kelembagaan, pengarusutamaan isu, peningkatan kapasitas masyarakat, pengendalian perubahan iklim, mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan, terlibat dalam forum nasional dan internasional untuk pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) merupakan asosiasi pemerintah kabupaten dibawah APKASI yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten demi mewujudkan pembangunan lestari dan mandiri yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat lewat gotong royong. LTKL memiliki 9 (Sembilan) kabupaten anggota di 6 (enam) provinsi di Indonesia, yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Siak, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Sigi yang membangun kerja kolaboratif bersama 26 jejaring mitra multipihak tingkat global, nasional dan daerah.	Mendukung kabupaten anggota dalam menyusun strategi pembangunan lestari, membangun kapasitas kelembagaan dan SDM, menghubungkan kabupaten anggota dengan mitra agar Kabupaten anggota dapat bertransformasi menjadi kabupaten yang berkelanjutan dengan melalui kebijakan dan perencanaan yang inovatif dan berbasis bukti, implementasi program pembangunan yang inklusif melalui proses kolaborasi multipihak, model bisnis dan investasi berkelanjutan, pengukuran dampak, dan amplifikasi narasi.	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) berperan strategis dalam pembangunan berketahanan iklim dengan mendorong integrasi pendekatan yurisdiksi ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten. LTKL mendukung pemerintah kabupaten untuk melindungi minimal 50% tutupan hutan di area APL serta ekosistem penting, sembari memastikan bahwa pembangunan tetap inklusif dan meningkatkan kesejahteraan bagi sedikitnya 1 juta masyarakat lokal melalui skema ekonomi lestari berbasis potensi daerah. Selain itu, LTKL memfasilitasi pengembangan model pembangunan daerah yang menghitung dan menghormati ambang batas ekosistem sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kabupaten memiliki kapasitas adaptif dalam menghadapi perubahan iklim secara berkelanjutan dan tangguh.

Mercy Corps Indonesia (MCI)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
<p>Mercy Corps Indonesia adalah afiliasi dari organisasi Mercy Corps Global. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1999, Mercy Corps Indonesia resmi menjadi yayasan nasional pada tahun 2012.</p> <p>Mercy Corps Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat mengubah tantangan yang mereka hadapi menjadi peluang yang selayaknya mereka dapatkan. Didorong oleh kebutuhan setempat, program-program kami menyediakan alat dan dukungan yang dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengubah kehidupan mereka sendiri. Mercy Corps telah meningkatkan lebih dari 15 juta kehidupan di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 1999 dan hingga saat ini kami terus bekerja pada isu-isu perkotaan serta masyarakat pesisir dan pedesaan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan.</p> <p>Mercy Corps Indonesia menyediakan bantuan langsung dan program jangka panjang untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dengan meningkatkan infrastruktur, ketahanan, dan peluang ekonomi masyarakat. Kami memiliki pengalaman bekerja di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.</p>	<p>Mercy Corps Indonesia berfokus pada peningkatan peluang ekonomi dan akses ke keuangan, ketahanan iklim dan bencana serta tanggap darurat. Kami menganalisa dan mengidentifikasi tantangan pembangunan dengan menggunakan pendekatan dari berbagai sisi serta mengaplikasikan pendekatan pengembangan pasar dan membangun ketangguhan untuk mencapai dampak yang berkelanjutan.</p> <p>Di dalam implementasi program, Mercy Corps Indonesia mengambil peranan sebagai fasilitator dan mempertemukan berbagai aktor yang relevan untuk mendorong perubahan. Kami menekankan pada kemitraan strategis dengan sektor swasta, pemerintah, masyarakat, dan lembaga penelitian dalam program dan bekerja sama dengan masyarakat untuk sepenuhnya memahami tantangan yang mereka hadapi dan bekerja sama dalam mencari solusi. Adanya model-model inovatif berbasis teknologi untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan yang dapat diaplikasikan dalam skala besar juga menjadi fokus pengembangan dari Mercy Corps Indonesia.</p>	<p>Memahami bahwa tantangan terkait iklim mengancam kehidupan, mata pencaharian, dan keberlanjutan jangka panjang komunitas, Mercy Corps Indonesia bekerja untuk memperkuat ketahanan komunitas dan mendorong langkah-langkah yang terkoordinasi dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam program-program kami sejak tahun 2009. Kami berkolaborasi dengan komunitas, lembaga pemerintah, sektor swasta, dan institusi akademik untuk merancang dan menerapkan solusi yang dapat diperluas dan berbasis bukti. Pendekatan kami mencakup peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, climate-smart planning and solutions, dan inisiatif ketahanan ekonomi yang membantu komunitas dalam mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari bencana. Melalui proses partisipatif, kami memastikan bahwa pengetahuan lokal dan locally-led process menjadi pusat dalam membangun ketangguhan jangka panjang.</p> <p>Beberapa program terkait pembangunan berketahanan iklim yang menjadi portfolio Mercy Corps Indonesia diantaranya adalah Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN), Climate Adaptation and Disaster Resilience, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketahanan, Building Resilience through the Integration of Gender and Empowerment, Transboundary Flood Risk Management through Governance and Innovative Information, Zurich Flood Resilience Program, Zurich Climate Resilience Alliance, dan Managing Risk through Economic Development. Kegiatan yang kami lakukan di bawah program-program tersebut menyentuh beberapa sektor, termasuk kelautan dan pesisir, air, dan pertanian.</p>
Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
<p>Oxfam di Indonesia merupakan bagian dari jaringan Oxfam Global yang berkomitmen untuk memanfaatkan cara praktis dan inovatif dengan menggerakkan keterampilan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Berperan dalam pemberdayaan dan perwujudan hak-hak perempuan, Oxfam berperan dalam mendorong pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengurangan ketidaksetaraan dan kemiskinan, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana.</p>	<p>Oxfam Indonesia berperan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan petani kecil melalui kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim untuk menciptakan keadilan ekonomi. Selain itu, Oxfam berperan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p>
Penabulu Foundation		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
<p>Penabulu merupakan organisasi sipil masyarakat yang berupaya memperkuat inisiatif lokal dan solusi berkelanjutan dalam memperjuangkan keadilan sosial, gender, ekonomi dan iklim untuk memastikan kehidupan tanpa kemiskinan dan keadilan masa depan.</p>	<p>Penabulu telah berdiri sejak tahun 2002 dan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dalam berbagai fokus bidang, seperti layanan dasar, manajemen kebencanaan, lingkungan dan iklim, pedesaan dan pemberdayaan komunitas.</p>	<p>Aksi yang dilakukan dalam mendukung kebijakan pembangunan berketahanan iklim banyak dilakukan melalui peningkatan tata kelola dan pendanaan serta peningkatan kapasitas dengan mengikutsertakan kelompok rentan.</p>

Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyiyah		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
LLHPB PP Aisyiyah merupakan badan pembantu Pimpinan Pusat Aisyiyah yang dibentuk dengan tujuan menyelamatkan alam dan kehidupan manusia dari dampak lingkungan dan bencana melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan. Lembaga ini diresmikan secara formal untuk membidangi isu lingkungan sejak tahun 2015. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas, koordinasi, dan konsolidasi anggota.	Lembaga ini berfokus pada isu lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.	LLHPB banyak berperan dalam membangun kesadaran, sikap hidup, perilaku ramah lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat luas sehingga mampu mengembangkan gerakan pelestarian lingkungan dan gerakan pengurangan risiko bencana.
Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah merupakan pengembangan dari Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah dalam merespon masalah lingkungan hidup, yang mengalami peningkatan permasalahan dalam masyarakat. Pembentukan MLH PP Muhammadiyah bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui, memahami, dan mampu mengembangkan kehidupan yang mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup.	Bergerak dalam peningkatan kapasitas pada bidang lingkungan hidup.	MLH PP Muhammadiyah banyak berperan dalam peningkatan pemahaman komunitas terhadap perubahan iklim, serta mendorong implementasi soft infrastructure berupa penanaman pohon untuk mendukung upaya konservasi.
PT Astra Agro Lestari		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
PT Astra Agro Lestari Tbk, merupakan salah satu inisiator industri kelapa sawit Indonesia. Didirikan pada 3 Oktober 1988 dengan nama PT Suryaraya Cakrawala, dan berubah nama menjadi PT Astra Agro Niaga di tahun 1989. Perseroan yang merupakan anak usaha PT Astra International Tbk (Astra) ini juga pernah menjalankan usaha pengelolaan perkebunan teh dan kakao di Jawa Tengah pada tahun 1990 dan kini Perseroan telah memfokuskan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Sejalan dengan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa, pada tahun 2022 Perseroan memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang berkelanjutan dengan memperkenalkan sebuah inisiatif yaitu Astra Agro Sustainability Aspiration 2030 meliputi Sustainable Development Goals (SDGs) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). Astra Agro Sustainability Aspiration 2030 menjadi strategi perusahaan yang dilaksanakan melalui 12 inisiatif yang tercakup dalam strategi Triple-P Roadmap yaitu Portfolio, People, dan Public Contribution, dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai key enabler.	Industri Kelapa Sawit	PT Astra Agro Lestari secara aktif bergerak pada pengembangan teknologi terutama pada bidang pertanian dengan menciptakan varietas yang berketahanan iklim. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan manajemen sumber daya yang digunakan dengan lebih efisien.
PT Asuransi Central Asia (ACA)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum. ACA menjadi salah satu perusahaan asuransi nasional dengan aset terbesar di Indonesia yang telah memiliki 79 jaringan kantor cabang dan perwakilan yang tersebar.	Bergerak dalam bidang pelayanan asuransi umum.	Menerbitkan polis asuransi pertanian yang mewajibkan petani secara disiplin melakukan budidaya sesuai SOP berbasis manajemen risiko iklim terintegrasi.

RARE Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Rare merupakan organisasi yang memaksimalkan potensial manusia untuk melindungi alam dan menghadapi perubahan iklim. Solusi yang diberikan berbasis pada komunitas dan modal manusia.	Perubahan Perilaku Nelayan Skala Kecil Melalui Pendekatan Pemberian Hak Akses Pengelolaan Kawasan Perairan	Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan juga mayoritas berupa tata kelola dan pendanaan dan peningkatan kapasitas, serta sebagian kecil lainnya berupa pembangunan infrastruktur atau pengembangan teknologi yang mayoritas bergerak di sektor kelautan dan pesisir.
Save The Children		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Save the Children Indonesia adalah bagian dari gerakan global Save the Children yang memungkinkan adanya kerja sama dengan jaringan lain pada 110 negara di seluruh dunia. Berkomitmen dalam penyediaan pelatihan dan sumber daya untuk membangun dan memberdayakan komunitas dengan memprioritaskan kebutuhan anak-anak.	Memastikan penguatan perlindungan, hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi setiap anak terutama pada lima lingkup tematik, mencakup kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan anak, pengentasan kemiskinan anak, dan tata kelola hak anak.	Kontribusi dalam Pembangunan Berketahanan Iklim ditunjukkan melalui program peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penyusunan rencana, dan implementasi yang berfokus pada anak-anak sebagai sasaran utama kegiatan.
UCLG ASPAC		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) muncul melalui adanya International Union of Local Authorities (IULA) yang berkomitmen untuk memberikan layanan pada kota-kota anggota dalam menjadi ruang pengetahuan kunci dalam diskusi isu pemerintah lokal pada lingkup wilayah Asia-Pacific.	UCLG ASPAC mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dengan menekankan keadilan sosial dan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi lokal, perubahan iklim, ketahanan bencana, budaya, perencanaan strategis, desentralisasi, pendanaan pemerintah, kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan dan lingkungan, dan good governance. Hal tersebut dilakukan melalui advokasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, penelitian dan pengelolaan pengetahuan, serta implementasi proyek pengembangan.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan peluang kerja sama, jejaring, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan pembangunan perkotaan.
UNDP		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan visi, strategi, dan rencana pembangunan nasional dan daerah lainnya. UNDP bekerja untuk membantu Indonesia mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan membantu mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 di seluruh Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Demokratis: Penguatan tata kelola dan partisipasi publik yang inklusif. Lingkungan dan Aksi Iklim: Mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan iklim. Kesetaraan Gender: Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Pencegahan Krisis: Pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascakrisis. 	UNDP memperkuat ketahanan iklim melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan kapasitas adaptif di tingkat nasional dan lokal, dengan menghubungkan praktik lapangan dan perumusan kebijakan.

UNICEF		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
UNICEF memulai perjalanannya di Indonesia sejak 1969 untuk membantu Indonesia mewujudkan pemenuhan hak-hak anak-anak dan perempuan. Program yang dijalankan oleh UNICEF berupaya mendorong komitmen untuk memberikan kesempatan yang adil dalam hidup bagi setiap anak, terutama bagi kelompok yang paling dirugikan.	Komitmen UNICEF dalam menjamin keberlangsungan tumbuh kembang dan pengembangan potensinya diwujudkan melalui penelitian dan penerbitan laporan untuk mendukung perencanaan, penyusunan arah kebijakan, pendanaan, dan penyediaan layanan kesehatan, perlindungan, dan pendidikan secara merata.	Sejalan dengan prinsip UNICEF dalam menjamin keadilan pemenuhan hak anak dan perempuan, komitmen dalam Pembangunan Berketahanan Iklim banyak diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas kaum muda dalam memahami dan terlibat aktif dalam proses penanganan perubahan iklim. Selain itu, UNICEF juga banyak melakukan kegiatan penelitian yang mendukung peningkatan tata kelola dan pendanaan Pembangunan Berketahanan Iklim.
World Health Organization (WHO) Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
WHO merupakan organisasi yang berkomitmen dalam peningkatan kualitas kesehatan, keselamatan, dan pelayanan terutama kepada kelompok rentan. Berpegang pada hak-hak dasar, keadilan dan keseragaman, berbasis pada nilai-nilai yang dipegang oleh WHO.	Dengan komitmen penyediaan layanan kesehatan bagi yang adil dan menyeluruh, WHO memberikan kontribusinya terhadap sistem kesehatan, regulasi kesehatan internasional, dan kesiapan terhadap epidemi, pandemi, dan krisis kedaruratan.	Dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, WHO banyak berperan dalam memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah terkait kesehatan dan iklim dan mengadvokasi panduan WHO global dalam penguatan sistem kesehatan berketahanan iklim.
World Resources Institute (WRI) Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Didirikan di Indonesia dengan nama awal Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, World Resources Institute merupakan organisasi nirlaba global yang melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil untuk melakukan penelitian, perencanaan, dan menjalankan solusi praktis yang mendukung peningkatan kehidupan masyarakat dan memastikan keberlanjutan alam untuk tetap lestari.	WRI Indonesia memberikan peran dalam mendorong terlaksananya kajian independen yang mendukung pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut, terutama berfokus pada lima bidang, yaitu Hutan dan Tata Guna Lahan, Iklim, Energi, Kota dan Transportasi, serta Laut.	Kontribusi yang diberikan dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim diimplementasikan melalui adanya kajian yang bertujuan untuk mendukung peningkatan tata kelola dan pendanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim.
Wahana Visi Indonesia (WVI)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. Lebih dari 20 tahun, WVI telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. WVI mengedepankan program pengembangan yang bersifat jangka panjang dengan menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berkelanjutan atau Area Program selama 10-15 tahun melalui kantor operasional yang berada di wilayah dampingan WVI.	Selama 25 tahun terakhir, sedikitnya ada 1,2 juta anak (50,4% laki-laki; 49,6% perempuan), 1,8 juta orang dewasa (49% laki-laki; 51% perempuan) di 197 kabupaten/kota, 19 provinsi yang ikut berpartisipasi secara langsung dan mendapat manfaat dari 527 program WVI. Pencapaian ini merupakan hasil implementasi program multisektor yang meliputi Perlindungan Anak, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dengan pengarusutamaan ketangguhan iklim dan GEDSI melalui pendekatan pengembangan transformasional, advokasi, dan tanggap bencana.	WVI mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam program-program multisektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (livelihood) tanpa meninggalkan inklusivitas di masing-masing program tersebut. Upaya pengarusutamaan ini dilakukan melalui project model Regreening Communities yang mengedepankan peran komunitas sebagai pelaku utama dan pemilik aksi iklim maupun perlindungan lingkungan. Sebagai organisasi fokus anak, WVI selalu memberikan edukasi pada generasi muda tentang peran dan fungsi mereka dalam aksi iklim untuk masa depan mereka. Kontribusi dalam pembangunan ketahanan iklim secara umum adalah melakukan penguatan kapasitas terhadap masyarakat, misalnya kelompok tani, kelompok perempuan, forum anak, termasuk tokoh adat dan agama. Di sektor pertanian, WVI mendorong pelaksanaan good agricultural practices dan climate smart agriculture. Di sektor air, WVI mendorong pengelolaan air berkelanjutan dan perlindungan mata air melalui program Integrated-WASH. Di sektor pesisir, WVI mendorong aktivitas ekonomi yang harmonis dengan perlindungan ekosistem pesisir (mangrove).

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
WWF Indonesia merupakan organisasi konservasi independen yang didirikan berdasarkan pemahaman tentang hubungan yang kompleks antara aktivitas manusia dan alam, dengan berfokus pada pencarian solusi yang dapat diterapkan dan memobilisasi aksi dari para pemangku kepentingan dan pendukung.	Berkomitmen dalam upaya konservasi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, WWF Indonesia berfokus pada tata kelola sumber daya alam yang berkontribusi pada ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia lestari, berkelanjutan dan terkelola secara adil, untuk kesejahteraan generasi masa ini dan masa depan.	WWF Indonesia banyak berkontribusi dalam peningkatan tata kelola dan pendanaan serta peningkatan kapasitas dalam kesadartahuan masyarakat terkait pengetahuan iklim.
Yayasan Agathis Dammara Karbon		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Yayasan Agathis Dammara Karbon (Adakarbon) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada solusi berbasis alam untuk mitigasi perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Kami mengembangkan dan mempromosikan pemanfaatan biochar, pemberdayaan petani, dan proyek karbon yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pelatihan, penelitian, serta kemitraan strategis.	Bergerak dalam bidang lingkungan terutama perkembangan inovasi dan teknologi sektor pertanian.	Pelatihan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah limbah organik menjadi biochar. Biochar merupakan salah satu bentuk aksi mitigasi perubahan iklim, yang bertujuan mengurangi emisi dari pembakaran terbuka sisa hasil pertanian sekaligus memberikan manfaat bagi kesuburan tanah, sekuestrasi karbon dan produktivitas lahan.
Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Yayasan Bina Karta Lestari merupakan lembaga swadaya masyarakat yang telah terbentuk sejak 1986 dengan kantor pusat berada di Kota Semarang. Yayasan ini memiliki visi menjadi mitra unggul dalam transformasi masyarakat berketahanan dan berkelanjutan. Bintari telah melakukan berbagai kegiatan meliputi penelitian, konsultasi dan pendampingan, dan pelatihan.	Bergerak dalam bidang terkait pengelolaan sampah, perubahan iklim dan penanggulangan Bencana, dan Pengelolaan sumber daya air.	Sejak 2017 Bintari telah berkontribusi dalam Pembangunan Berketahanan Iklim melalui peningkatan ketangguhan masyarakat. Hingga tahun 2025, Bintari memberikan kontribusi peran dalam PBI terutama melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola.
Yayasan BUMN		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Yayasan BUMN adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 31 Desember 2018 di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memulai transformasi pada 5 Juli 2025 untuk melipatgandakan dampak programnya. Visi yayasan adalah "Membangun jiwa, raga, dan alam untuk Indonesia" dengan Misi "Melipatgandakan Dampak Transformatif untuk Membentuk Manusia dan Alam demi Masa Depan". Tujuan program-programnya selaras dengan Asta Cita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Yayasan BUMN bergerak di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya terbagi menjadi dua bidang: Kesehatan (meliputi Kesehatan Ibu & Anak dan Kesehatan Mental) dan Lingkungan (meliputi Sistem Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Limbah).	Peran yayasan dalam ketahanan iklim diwujudkan terutama melalui program Perempuan Bahari, yang bertujuan memberdayakan perempuan pesisir melalui pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan untuk mencapai ekonomi biru yang inklusif. Bentuk kegiatan yang relevan dengan ketahanan iklim meliputi: Edukasi perikanan berkelanjutan, Program adaptasi iklim dan mitigasi bencana, Pembangunan infrastruktur air bersih (seperti rainwater catchment) dan edukasi sanitasi berbasis masyarakat. Selain itu, program 'Pikiran Terbaik Negeri' juga mendukung inovasi sosial untuk menjawab tantangan yang ada di lingkungan.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) merupakan organisasi nirlaba berbasis sains yang didirikan di Indonesia pada tahun 2014 dan membangun landasan yang kuat dalam menjadi bagian dalam program konservasi alam nasional selama lebih dari 20 tahun. Dengan misi perlindungan wilayah lahan dan air sebagai sistem pendukung kehidupan, YKAN menyediakan solusi inovatif dalam rangka harmonisasi alam dan manusia melalui manajemen sumber daya alam yang efektif.	YKAN bergerak dalam menciptakan konsep pembangunan dan implementasi dari Nature-based Solution pada aksi adaptasi iklim, ketangguhan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kapasitas.	Kontribusi YKAN dalam pembangunan berketahanan iklim meliputi penilaian kerentanan yang dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan aksi ketahanan iklim. YKAN bergerak dalam implementasi nature-based solution, meningkatkan ketangguhan pesisir, dan mengembangkan penelitian terkait restorasi terumbu karang dan perlindungan kelautan dan pesisir.
Yayasan Konservasi Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Yayasan Konservasi Indonesia merupakan yayasan nasional yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Dalam mendukung pemerintah dan berkolaborasi dengan para mitra, Yayasan Konservasi Indonesia merancang dan menghadirkan solusi inovatif berbasis alam serta pendekatan strategi pengelolaan bentang darat dan bentang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan alam di Indonesia.	Melindungi ekosistem kritis di bentang laut dan bentang darat, mengelola mata pencaharian berkelanjutan termasuk ekowisata, perikanan, dan pertanian berkelanjutan.	Yayasan Konservasi Indonesia berkontribusi dalam melakukan studi yang mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat kapasitas mitra strategis, menciptakan inisiatif yang memadukan tata kelola, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terutama pada bidang kelautan dan pesisir.
Yayasan Lahan Basah (YLBA)/Wetlands International Indonesia		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Wetlands International Indonesia/Yayasan Lahan Basah (YLBA) adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pelestarian dan restorasi lahan basah. Yayasan ini merupakan bagian dari jaringan kerja Wetlands International yang berkantor pusat di Belanda, dan memiliki kesepakatan Global Network Partnership Agreement, yang memungkinkan YLBA menjadi perwakilan Wetlands International di Indonesia dan menjalankan prinsip-prinsip dan panduan organisasi global di tingkat nasional.	Gagasan pekerjaan dirangkum dalam tiga Arus (Stream) yang diadopsi dari organisasi induk kami, dengan mempertimbangkan kombinasi kepentingan ekosistem lahan basah untuk alam dan masyarakat. Ketiga arus tersebut adalah Delta dan Pesisir, Sungai dan Danau, serta Gambut.	Lahan basah dimanfaatkan secara bijaksana dan direstorasi untuk peran penting yang diembannya dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia dan mata pencaharian bagi penghidupan masyarakat lokal, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan daur air dan mengurangi perubahan iklim serta dampaknya.
Yayasan Madani Berkelanjutan		
Informasi Umum	Bidang Kegiatan	Peran dalam Peningkatan Ketahanan Iklim
Madani didirikan pada tahun 2016 di Jakarta. Madani didirikan dengan tujuan memperkuat inisiatif nasional dan lokal dalam menyelamatkan hutan dan lahan Indonesia untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan strategi menjembatani hubungan antar-pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil). Madani memiliki misi untuk mempromosikan kebijakan dan aksi untuk menyelamatkan hutan alam dan gambut untuk mencapai komitmen iklim.	Madani memiliki visi mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dengan cara: 1. Menjembatani pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkearifan lokal; 2. Memperkuat advokasi kebijakan publik untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam; 3. Memperkuat suara masyarakat sipil melalui riset advokasi, dan kampanye untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.	Bentuk-bentuk kegiatan ketahanan iklim yang dilakukan oleh Madani adalah peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah dan masyarakat secara luas dengan penekanan pada kelompok rentan.



5. PENUTUP

Lembaga nonpemerintah telah menunjukkan peran yang signifikan dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan agenda pembangunan nasional terutama pada Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim. Hal tersebut tercermin melalui kegiatan dan program intervensi yang telah banyak dilakukan dalam periode 2020-2025 pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, pertanian, air, dan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari informasi yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa intervensi yang lebih banyak dilakukan berupa peningkatan kapasitas masyarakat. Sektor Kelautan dan Pesisir menjadi sektor dengan implementasi aksi paling besar yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah pada dalam periode 2020-2025. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi implementasi aksi pada sektor prioritas lainnya dengan memaksimalkan empat alternatif pendekatan, meliputi infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan.





LAMPIRAN

LAMPIRAN Daftar Aksi Ketahanan Iklim Lembaga Non-Pemerintah

GIZ Climb, CLARITY, Green Economy Transformation (GET) 4.0					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Mendukung Kajian Study on Climate Change Impact on People Displacement in Coastal Areas and Small Islands of Indonesia (CLIMB)	2023-2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Preparation of studies on Loss and Damage in the agricultural sector in Indramayu and Cyclone Seroja in East Nusa Tenggara.(GET)	2024	Indramayu Nusa Tenggara Timur	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
3	Sub-National Adaptation Plan Capacity Building in Lampung Province (Clarity)	2025	Lampung	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
4	Finalization of EbA Guideline (Clarity)	2025	Nasional	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
5	Workshop on Loss and Damage (Clarity)	2025	Nasional	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Input for Global Goal Adaptation (Clarity)	2025	Nasional	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
7	Development of National Adaptation Plan (Clarity)	2025	Nasional	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Dukungan terhadap Direktorat Kesehatan Gizi Masyarakat dan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas dalam Menyusun RAN PG berketahanan iklim dan studi pangan lokal sehat berketahanan iklim untuk mendukung implementasi RAN PG dan RAD PG	2025-Ongoing	Nasional	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal sehat yang ramah lingkungan dan iklim; tempe kacang koro di Aceh dan Jawa Barat, Jakarta dan ikan kecil (wader, bilih) di DIY dan Sumbar	2024	Aceh Sumatera Barat DI Yogyakarta Jawa Barat	Pertanian	Peningkatan Kapasitas

3	Studi jenis dan value chain pangan lokal sehat ramah lingkungan dan iklim	2024	Nasional	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
4	Kampanye konsumsi pangan lokal sehat ramah lingkungan dan iklim	Upcoming	Nasional	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
5	Studi dampak perubahan iklim terhadap kandungan nutrisi pangan prioritas di Indonesia	2025	Nasional	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
ICLEI – Local Governments for Sustainability					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Sustainable Cities Impact Programme (SCIP) or UrbanShift	2020 - 2027	Jakarta Semarang Bitung Balikpapan Palembang	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
2	Socially Inclusive Resilience in Asia (SIRA)	2024 - 2026	Palembang Balikpapan Semarang	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
3	Climate Resilient & Inclusive Cities (CRIC)	2024	Kupang Gorontalo	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
4	CDP ICLEI Track, part of OPCC (One Planet City Challenge)	2025-2026	Regional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
5	ICLEI TAP	2025-ongoing	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
Kawungpitu Institute					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Kajian partisipatif ekosistem mangrove	2024	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

2	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan	2024-2025	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
3	Sekolah Lapangan budaya kepingin bakau dan lebah madu pada ekosistem mangrove	2024-2025	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
4	Pelatihan dan pemantauan kondisi kesehatan ekosistem mangrove	2025	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
Kemitraan					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Pembangunan Ruang Publik Berketahanan Iklim	2023-2025	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Air	Infrastruktur
2	Rehabilitasi Talud sepanjang 2 km	2023-2025	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
3	Pembangunan Breakwater Kota Pekalongan	2021-2026	Kota Pekalongan, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
4	Pembangunan MCK Komunal	2021-2026	Kota Pekalongan, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
5	Pembangunan TPST	2021-2026	Kota Pekalongan, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
6	Pembangunan TPS3R berbasis Masyarakat	2021-2026	Kota Pekalongan, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
7	Pembangunan Early Warning System	2022-2024	Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan	Air	Teknologi
8	Demplot Climate Smart Agriculture	2022-2024	Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	Pertanian	Teknologi
9	Pembangunan Rumah Bibit Kopi Adaptif	2024	Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	Pertanian	Teknologi

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
10	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Daerah Perubahan Iklim	2021-2026	Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Kabupaten Batang, Tegal, Demak, dan Pekalongan, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
Kepalangmerahan					
1	Pelatihan PRB dan manajemen risiko iklim	2020	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
2	Pengarusutaman PRB dan API ke dalam agenda pembangunan Desa	2020	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
3	Kampanye PRB dan Perubahan Iklim	2020 - 2023	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
4	Pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas	2022	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Teknologi
5	Pelatihan PRB kepada SIBAT	2020	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
6	Kampanye penyadaran masyarakat	2020 - 2023	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
7	Implementasi Nature based Solutions/Soulsi Berbasis Alam	2022 - 2023	7 desa Kabupaten Tanggamus Lampung 5 desa Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
8	Pengukuran stok karbon	2022	Kabupaten Tanggamus, Lampung Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
9	Pembangunan Mangrove Centre	2023	Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
10	Penulisan Report SEACAR (Southeast Asia Climate Adaptation and Resilience)	2024	Kabupaten Manggarai, NTT	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
11	Studi Persepsi Panas Ekstrem	2024	Surabaya	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas

				Medan		
12	Pembentukan Koalisi Panas Ekstrem Kota	2023		Surabaya Medan	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
13	Kajian Risiko dan Dampak Panas Ekstrem bersama BMKG	2023-2025		Surabaya Medan	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
14	Kajian Risiko dan Dampak Panas Ekstrem bersama BMKG	2025-2026		Surabaya Medan	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
15	Kampanye Panas Ekstrem	2023-2025		Surabaya Medan	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
16	Kampanye Panas Ekstrem	2025-2026		Surabaya Medan	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
17	Rencana Aksi Panas Kota	2025-2026		Surabaya Medan	Kesehatan	Tata Kelola dan Pendanaan
18	Rencana Aksi Panas Kota	2025-2026		Surabaya Medan	Kesehatan	Tata Kelola dan Pendanaan
19	Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	2024		Surabaya Medan	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
20	Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	2025-2026		Surabaya Medan	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
21	Pelatihan PRB dan manajemen risiko iklim	2023		Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
22	Pengarusutaman PRB dan API ke dalam agenda pembangunan Desa	2023		Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
23	Kampanye PRB dan Perubahan Iklim	2023-2026		Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

24	Pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas	2025	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Teknologi
25	Pelatihan PRB kepada SIBAT	2023	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
26	Kampanye penyadaran masyarakat	2023-2026	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
27	Implementasi Nature based Solutions	2025-2026	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
28	Pengukuran stok karbon	2026	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
29	Pembangunan Mangrove Centre	2026	Buru Selatan, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
30	Sosialisasi Roadmap Adaptasi dan Ketahanan Iklim PMI	2025-2027	Seluruh PMI Provinsi dan Kabupaten di Indonesia	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
31	Bimtek isu Iklim dan Lingkungan	2025-2027	PMI Kabupaten Probolinggo Perluasan menasar seluruh PMI Provinsi di Indonesia	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
32	Kampanye penyadaran masyarakat	2025-2027	PMI Kabupaten Probolinggo Perluasan menasar seluruh PMI Provinsi di Indonesia	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
33	Kampanye Gerakan Hijau PMI	2025-2026	PMI Kabupaten Probolinggo Perluasan menasar seluruh PMI Provinsi di Indonesia	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
34	Pemetaan melalui Street Level Imagery	2024	Medan Surabaya	Lintas sektor	Teknologi
35	Pelatihan kajian risiko bencana berbasis masyarakat - sensitif iklim dan jender	2021	Nasional	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas

36	Kampanye Gerakan Hijau PMI	2024	Kupang, NTT	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
37	Kampanye Gerakan Hijau PMI	2024	Denpasar, Bali	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
38	Pelatihan nasional aksi antisipasi (aksi merespon peringatan dini)	2024	Jakarta	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
39	Pengembangan pendekatan Aksi antisipasi dan dokumen Protokol Aksi Dini untuk ancaman Banjir melalui proyek Forecast-Based Action (FbF)	2020-2023	Jakarta	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
40	Advokasi pendekatan aksi antisipasi (aksi merespon peringatan dini/AMPD) bencana hidrometeorologi	2023 - ongoing	NTT NTB Jawa Timur Bali	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
41	Implementasi rencana readiness Protokol Aksi Dini	2025- 2030	Nasional	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
42	Pemantauan Peringatan Dini Bahaya Banjir berbasis Sungai	2025-2026	Kota Sukabumi	Lintas sektor	Teknologi
43	Implementasi Nature based Solutions/Soulsi Berbasis Alam	2015-2020	Wonogiri Solo Bojonegoro Jakarta Selatan Bogor Kab Bandung	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
44	Implementasi PRB dan Peringatan Dini	2021	Bogor Jakarta Selatan	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
45	Surveilans berbasis komunitas	2020 - 2024	Bali Bogor Boyolali	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
KIAT					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	PDAM performance based grant	2024	Bandung	Air	Infrastruktur

KONSEPSI					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
			Palembang Wonosobo Banyumas Kebumen Pesisir Selatan		
1	Program Memperkuat Ketangguhan Terhadap Bencana melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat di Wilayah Rinjani Timur.	2015 - 2016	Lombok Timur	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
2	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara	2016 - 2017	Lombok Timur Lombok Utara	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
3	Program Voice For Change Partnership, Food and Nutrition Security.	2016 - 2020	Lombok Timur	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
4	Memperkuat Partisipasi Perempuan Melalui Teknologi, 2 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur	2017-2020	Lombok Timur	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
5	Program Membangun Ketangguhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram	2017 - 2018	Kota Mataram	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Program Indonesia Climate and Disaster Resilient Communities (ICDRC) "Membangun dan Memperkuat Ketangguhan Masyarakat Pedesaan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Lombok Timur"	2019 - 2020	Lombok Timur	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
7	Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah	2018 - 2020	Kota Palu Kabupaten Sigi dan Donggala	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
8	Supporting Poor Communities to Claim Their Rights in Climate Change (SP-2CRC2)	2019 - 2020	Lombok Timur	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
9	Program Pelaksanaan STBM – WASH di Kabupaten Lombok Tengah	2019 - 2020	Lombok Tengah	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas

10	Livelihood Recovery After Disaster (LIRAD) di Pulau Lombok	2019 - 2020	Lombok Barat	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
11	Program Pengembangan PRB Berbasis Masyarakat Terhadap Mata Pencaharian yang Tangguh dan Berkelanjutan di Pulau Lombok	2019 – 2020	Lombok Timur Lombok Utara Lombok tengah Lombok Barat	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
12	Program Australia-Indonesia Partnership in Disaster Risk Management Program (AIP-DRM)/ SIAP SIAGA	2022	Lombok Tengah Lombok Utara	Lintas sektor	Peningkatan Kapasitas
13	Program DECCAP (Deepening Climate Change Adaptation for Prosperity)	2022	Lombok Timur	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
14	Program "Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)"	2021-2024	Lombok Timur	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
15	Hunger Prevention For Covid-19 Affected Poor Population	2022	Kota Mataram Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
16	Inclusiveness for Climate-related Finance Mechanism (IN-LINE)	2022	Lombok Tengah	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
17	Pendalaman Kolaborasi Multi-Pihak untuk Replikasi Strategi Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana yang Inklusif dan Berkelanjutan.	2022-2023	Lombok Timur Lombok Utara Lombok Barat	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
18	FomaPro - Fostering Multistakeholder Alliance for Pro Poor and Gender Sensitive Low carbon Development and Climate Resilience	2022-2024	Lombok Utara	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
19	Perluasan Inisiatif dan Partisipasi Pengelolaan Risiko Bencana Desa Menuju resiliensi Berkelanjutan	2024	Lombok Utara	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
20	VCA – Inclusiveness Climate Knowledge Management Network (Inclick-Mnet)	2022 - 2025	DKI Jakarta DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Papua	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan

21	Improvement Community Anticipatory Action (I CAN ACT) Phase II	2024-2025	Kabupaten Lombok Barat : Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar dan Desa Taman Ayu, Kec. Gerung Kabupaten Lombok Timur : Desa Obel-Obel, Kec. Sambelia, Desa Dara Kunci, Kec. Sambelia dan Desa Belanting, Kec. Sambelia	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
22	Inclusive Tackling toward Ecosystem-based Resilience in Alerted Climate Threats (INTER-act)	2023 - 2025	Desa Sukadana dan Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut – Kabupaten Lombok Tengah	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
23	Unlocking Resilience-Program Kelulusan Kemiskinan dan Ketangguhan Masyarakat (P3KM)	2024-2026	Desa Puncak Jeringo, Desa Perigi, Desa Mekarsari, Desa Selaparang, Desa Sutalangu, Kecamatan Suela- Kabupaten Lombok Timur	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
24	Penguatan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif untuk Desa Tangguh Bencana-Berketahanan Iklim (DESTANA-BERIKLIM) Berbasis Kawasan di Nusa Tenggara Barat	2025-2026	Lombok Utara Sumbawa	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
25	Program Review and Revision of Provincial Low Carbon and Climate Resilient Development (LCCRD)	2025	Nusa Tenggara Barat	Lintas sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
LAMFI (Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Kader Kesehatan Peduli Iklim			Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
2	Penguatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tangguh Iklim			Kesehatan	Infrastruktur
3	Riset Penyakit Sensitif Iklim			Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
4	Promosi Kesehatan & Edukasi Publik Ramah Kesehatan Lingkungan			Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
5	Penguatan Kebijakan & Tata Kelola			Kesehatan	Tata Kelola dan Pendanaan
6	Ekosistem & Ketahanan Pangan Berbasis Kesehatan			Kesehatan	Peningkatan Kapasitas

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	2022-2025	Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi DI Yogyakarta Provinsi NTT Provinsi NTB Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Kalimantan Timur	Air	Infrastruktur
2	Pendirian Posko Kebencanaan	2022-2025	Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi DI Yogyakarta Provinsi NTT Provinsi NTB Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Kalimantan Timur	Lintas Sektor	Infrastruktur
3	Penanaman Pohon dan bersih bersih pantai/sungai	2022-2025	Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi DI Yogyakarta Provinsi NTT Provinsi NTB Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Kalimantan Timur	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur

4	Sosialisasi Sekolah dan Madrasah di satuan pendidikan aman Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	2022-2025	Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
5	Pelatihan PRB - API	2022-2025	Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Penyusunan Rencana PRB - API	2022-2025	Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
7	Penyusunan SOP dan Mekanisme Penanganan Bencana	2022-2025	Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
8	Simulasi Penanganan Bencana	2022-2025	Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas

Lingkar Temu Kabupaten Lestari

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penguatan dampak kebijakan & perencanaan	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
2	Capacity & capability building for Decision Makers in the Districts Member	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas

Sanggau
 Kapuas Hulu
 Bone Bolango
 Gorontalo
 Sigi

3	Strengthen Value Chain	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
---	------------------------	-----------	--	---------------	-----------------------

Aceh Tamiang
 Siak
 Musi Banyuasin
 Sintang
 Sanggau
 Kapuas Hulu
 Bone Bolango
 Gorontalo
 Sigi

4	Strengthening of Business Ecosystem	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
5	Financing & Market Access to support business ecosystem	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan

Aceh Tamiang
 Siak
 Musi Banyuasin
 Sintang
 Sanggau

6	Penguatan peran LTKL dalam mendukung komitmen kabupaten lestari dan mandiri	2024 2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
---	--	-----------	--	---------------	-----------------------

	Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi			
7	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Aktivasi Ekosistem Kolaborasi Lintas Yurisdiksi	2024 2025	Lintas Sektor Peningkatan Kapasitas
8	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Community of Practice: Ruang kolaboratif multipihak untuk berbagi pembelajaran, menyelaraskan strategi, dan mendorong aksi pembangunan berkelanjutan	2024 2025	Lintas Sektor Peningkatan Kapasitas
9	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Pengembangan Strategi Amplifikasi Narasi dan Pendokumentasian Learning Process	2024 2025	Lintas Sektor Peningkatan Kapasitas
12	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango	Pembangunan Sistem Tata Kelola Data yang Valid di Kabupaten Sebagai Alat Ukur Proses Kemajuan Kabupaten Lestari	2024 2025	Lintas Sektor Peningkatan Kapasitas

Gorontalo
Sigi

13	Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Tata Kelola Data di Kabupaten untuk Merekam Proses Kemajuan Kabupaten Lestari	2024-2025	Aceh Tamiang Siak Musi Banyuasin Sintang Sanggau Kapuas Hulu Bone Bolango Gorontalo Sigi	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
----	---	-----------	--	---------------	-----------------------

Mercy Corps Indonesia (MCI)

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penyusunan Kajian Perkembangan, Pengetahuan, Tata Kelola dan Kerangka Penanggulangan Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim di Indonesia	2023	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Penyusunan Summary for Policy Maker Perkembangan, Pengetahuan, Tata Kelola dan Kerangka Penanggulangan Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim di Indonesia	2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
3	Penyusunan Kajian Analisis Kesenjangan dan Peluang Kebijakan terkait Genangan Pesisir Permanen	2024	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Penyusunan Summary for Policy Maker Analisis Kesenjangan dan Peluang Kebijakan terkait Genangan Pesisir Permanen	2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
5	Mendukung penyusunan Kajian Diagnosa Tata Kelola, Kelembagaan dan Mekanisme Keuangan terkait Pembiayaan Loss and Damage di Indonesia	2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
6	Mendukung proses advokasi di tingkat global melalui: - Masukan di dalam dokumen Second Nationally Determined Contributions dan Biennial Transparency Report (BTR) - Mendukung penyusunan country submission and position pada COP 27, 28 dan 29 untuk lingkup Loss and Damage	2022-2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan

7	Virtual Workshop dan Diskusi Multi-aktor Penanganan Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim dan Tata Kelola Genangan Pesisir Permanen	2023-2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
8	Penyusunan materi advokasi dan komunikasi yang bersifat populer untuk membangun kesadaran dan pemahaman publik mengenai ketahanan banjir, ketahanan iklim dan perspektif lintas batas dalam pengelolaannya; diantaranya: - Short Video CRIA dan resilient livelihood - Impact Story Video - Human Story Video - Program Documentation	2022-2025	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
9	Penyusunan Climate Risk Impact Assessment (CRIA) di DAS Kupang	2020-2021	DAS Kupang dan Pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
10	Pentas Seni Budaya Ojo Nganti Kelep	2022	Desa Api-api, Wonokerto, Kab. Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
11	Penyusunan Pre-Feasibility Study "Pembangunan Waduk untuk Mendukung SPAMREG Petanglong" dan advokasi terkait di tingkat kab/kota dan provinsi	2022-2024	DAS Kupang (Kota dan Kabupaten Pekalongan)	Air	Infrastruktur
12	Policy Dialogue dan penyusunan Policy Brief "Bangkit dari Banjir di Pekalongan: Kebutuhan Kebijakan Transformatif"	2023	Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
13	Policy Dialogue dan penyusunan Policy Brief "Menuju Peradaban Maritim yang Kontemporer: Strategi Transformasi Pengurangan Risiko Banjir Jangka Panjang"	2024	Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
14	Policy Dialogue "Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah"	2025	Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
15	Penyusunan Kajian ICZM (Integrated Coastal Zone Management) di Pantura Jawa Tengah (studi kasus di 3 tipologi wilayah)	2025	Kawasan hilir DAS Kupang, DAS Babon, dan DAS Tuntang Zona Pesisir Kota & Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
16	Masukan formal terhadap kebijakan daerah meliputi: - Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah - Dokumen RPJMD Kab. Pekalongan	2025	Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan

	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RPJMD Kota Pekalongan - Dokumen RTRW Kab. Pekalongan - Dokumen RTRW Kota Pekalongan 					Tata Kelola dan Pendanaan
17	Advokasi integrasi hasil kajian partisipatif ke dalam perencanaan dan penganggaran desa	2023		Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
18	Advokasi terkait perlindungan mata air di tingkat desa	2023		Desa Jolotigo, Kab. Pekalongan	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
19	Pembuatan rorak, embung dan kolam-kolam penampungan air di kawasan pertanian	2023 dan 2025		Desa Simego, Kab. Pekalongan	Air	Infrastruktur
20	Penanaman rumput vetiver dan vegetasi lainnya di kawasan miring dan/atau rawan longsor	2023 dan 2025		Empat desa di Kab. Pekalongan: 1. Desa Simego 2. Desa Yosorejo 3. Desa Jolotigo 4. Desa Batur Sari	Air	Infrastruktur
21	Pelaksanaan proses kajian ketahanan iklim partisipatif di tingkat desa serta mengimplementasikan beragam skema edukasi publik terkait isu ketahanan banjir dan perubahan iklim di kawasan Pekalongan Raya	2023-2025		Dilakukan di Kab. dan Kota Pekalongan. Kegiatan PLUP; 1. Desa Yosorejo 2. Desa Tlogohendro 3. Desa Simego 4. Desa Jolotigo 5. Desa Batur Sari 6. Desa Jaruksari 7. Kelurahan Bandengan 8. Kelurahan Krapyak 9. Kelurahan Degayu Kegiatan CRMC; 1. Desa Jeruksari 2. Kelurahan Padukuhan Kraton 3. Desa Tratebang 4. Kelurahan Krapyak 5. Kelurahan Degayu Kegiatan CRVA; 1. Desa Simego 2. Desa Jolotigo 3. Desa Sengare 4. Desa Jeruksari	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Desa Tratebang 6. Kelurahan Krapyak Kegiatan PCP; <ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Simego 2. Desa Jototigo 3. Desa Sengare 		
22	Pelaksanaan proses partisipatif dengan para petani/petambak untuk mengidentifikasi komoditas prioritas dan perumusan strategi adaptasinya	2023	Dilakukan di Kab. dan Kota Pekalongan Hulu: 1. Desa Simego 2. Desa Tlogohendro Hilir: Desa Jeruksari, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
23	Pelaksanaan sekolah lapang iklim, pelatihan budidaya adaptif dan sekolah lapang budidaya bandeng	2023	Dilakukan di Kab. dan Kota Pekalongan Hulu: 1. Desa Simego 2. Desa Tlogohendro Hilir: Desa Jeruksari, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
24	Penerapan praktik budidaya pertanian yang menginkluskikan prinsip konservasi air dan tanah	2023-2025	1. Desa Simego, Kab. Pekalongan 2. Desa Tlogohendro; Kab. Pekalongan	Pertanian	Teknologi
25	Penerapan praktik perikanan budidaya adaptif dengan komoditas bandeng	2023-2025	1. Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan 2. Kel. Krapyak, Kota Pekalongan 3. Kel. Degayu, Kota Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Teknologi
26	Pengembangan sistem Infomasi Iklim Berbasis Komunitas untuk Sektor Perikanan Budidaya dan Pertanian Holtikultura	2023-2027	Kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan lokasi pendampingan pemanfaatan spesifik di: Hilir 1. Desa Jeruksari 2. Kel. Krapyak 3. Kel. Degayu	Kelautan dan Pesisir	Teknologi

Hulu: 1. Desa Simego 2. Desa Tlogohendro					
27	Rumah tangga dengan sistem mata pencaharian yang ditingkatkan melalui: i) akses ke sumber daya untuk mempersiapkan dan menghadapi; ii) mata pencaharian yang sensitif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.	2022 - 2027	Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
28	Pelatihan/ lokakarya praktik pertanian cerdas iklim yang baik bagi petani berisiko (termasuk sekolah/praktik lapangan iklim)	2022 - 2026	Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
29	Masyarakat yang rentan mengad+B27opsi mata pencaharian yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.	2022-2027	Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
30	Rantai nilai dan sistem pasar Nexus di ditingkatkan.	2022-2027	Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Pertanian Cerdas Iklim	2020 - 2023	Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Pembentukan kelompok muda UMKM serta penguatan jejaring baru	2020 - 2023	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
3	Pengembangan energi Terbarukan Berbasis Komunitas untuk akses air bersih di NTT	2023 - 2026	Nusa Tenggara Timur	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Memperkuat kapasitas organisasi perempuan dalam isu iklim dan transisi energi berkeadilan	2023 - 2025	Nasional	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
5	Penyusunan Buku Panduan Sistem Peringatan Dini bagi Kelompok Rentan	2020 - 2023	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Aksi Antisipasi	2023 - 2026	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Kupang, Nusa Tenggara Timur	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan

7	Membangun ketangguhan komunitas terhadap bencana	2024-2026	Timor Tengah Selatan dan Malaka, Nusa Tenggara Timur	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
8	Pembangunan demonstration plot untuk adaptive agriculture	2024-2026	Timor Tengah Selatan dan Malaka, Nusa Tenggara Timur	Pertanian	Peningkatan Kapasitas

Penabulu Foundation

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Voice for Just Climate Action	2021-2025	Lembata, Sumba Timur, Kupang, dan Rote Ndao	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
2	Women and Vulnerable Group Benefited and Lead on Transformative and Just Energy Transition in Indonesia	2023-2033 (10 Tahun)	Nusa Tenggara Timur & Nusa Tenggara Barat	Air	Peningkatan Kapasitas
3	Co-Evolve	2024-2027	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Perlindungan Ekosistem Pesisir Berbasis Kearifan Lokal - MURO	01 Oktober 2024 – 30 September 2026	Lembata, NTT	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
5	Improvement Community Anticipatory Action (I CAN ACT) towards Flood fase 3	1 Juli 2025 – 31 Januari 2026	Nusa Tenggara Barat (4 desa rawan banjir di wilayah Lombok Timur dan Lombok Barat, yaitu Obel-Obel, Belanting, Dasan Geria dan Taman Ayu)	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
6	Asia Community Disaster Preparedness & Transformation (ACT)	Phase 1: October 2020 – December 2023 /Phase 2: January 2024 – December 2026	Nusa Tenggara Timur (Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan (TTS); Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. Timor Tengah Selatan (TTS); Desa Motalun, Kec. Malaka Barat, (Kab. Malaka)	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan

LLHPB PP Aisyah

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penanaman pohon dengan sistem pola asuh melalui kampanye se Indonesia, pilot project penanaman tanaman keras di hulu dan mangrove di Pesisir	2024	Riau (Pelalawan, Pekanbaru, Siak), Kalimantan Barat (Kubu Raya, Mempawah), Jawa Tengah (Demak, Sukoharjo).	Air	Infrastruktur

2	Desa Tangguh Bencana berketahanan Iklim	2024	Demak Jawa Tengah	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
3	Desa Tangguh Bencana berketahanan Iklim	2025-2027	Moyo, Sumbawa Lasiana, Kupang, NTT	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Majelis Kesehatan: Gerakan Aisyiyah untuk pencegahan penyakit menular (TB, DBD), air bersih dan stunting	2024-2025	Jawa Timur	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
5	Majelis Ekonomi: Gerakan Lumbung Hidup Aisyiyah untuk ketahanan pangan	2022-2025	48 Kab/Kota	Pertanian	Peningkatan Kapasitas

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Program Hutan Berkemajuan "1001 Hektar Untuk Kehidupan Berkelanjutan"	2025 - 2027	Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi NTB Provinsi Bengkulu Provinsi Riau Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan	Air	Infrastruktur
2	Pelatihan Kader Lingkungan "The Next Green Generation"	2024 - 2027	34 Provinsi	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
3	Program Adiwiyata Berkemajuan "1001 SEKOLAH MUHAMMADIYAH BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP"	2025 - 2027	34 Provinsi	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan

PT Astra Agro Lestari

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Conservation of Peatland	2024	Nasional	Air	Infrastruktur

2	Melakukan eksplorasi atau pengembangan varietas kelapa sawit yang lebih tahan terhadap cekaman iklim	2024	Nasional	Pertanian	Teknologi
3	Menerapkan praktik pertanian regeneratif dengan memprioritaskan operasi berkelanjutan	2024	Nasional	Pertanian	Teknologi
4	Melakukan penelitian climate-smart pest management dengan mempertimbangkan paparan iklim di masa depan.	2024	Nasional	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
5	Meningkatkan water management system dan sistem drainase.	2024	Nasional	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
PT Asuransi Central Asia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Menerbitkan polis asuransi pertanian bagi Farm Management yang menjalankan usaha budidaya pertanian dalam ekosistem pertanian berkelanjutan berbasis manajemen risiko iklim terintegrasi	2015-2025	NTB, Pulau Jawa, Sumatera	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
RARE Indonesia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penyusunan dokumen kerentanan terhadap perubahan iklim sebagai bagian dalam penyusunan strategi PAAP di wilayah kerja.	2025 - 2027	<p>Sulawesi Tenggara</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton Buton Tengah Muna <p>Sulawesi Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kep. Sangihe Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Minahasa Utara Minahasa Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Timur Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Utara 	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan

				<ul style="list-style-type: none"> 9. Bolaang Mongondow 10. Bolaang Mongondow Selatan
				<p>Sulawesi Tenggara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Konawe Utara 2. Konawe Kepulauan 3. Konawe Selatan 4. Bombana 5. Muna 6. Muna Barat 7. Buton Utara 8. Buton 9. Buton Tengah 10. Buton Selatan
				<p>Sulawesi Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kep. Sangihe 2. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 3. Minahasa Utara 4. Minahasa 5. Minahasa Tenggara 6. Bolaang Mongondow Timur 7. Minahasa Selatan 8. Bolaang Mongondow Utara 9. Bolaang Mongondow 10. Bolaang Mongondow Selatan
2	Peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pemangku kepentingan untuk konservasi ekosistem laut, perikanan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim.	2025 - 2027		<p>Kelautan dan Pesisir</p> <p>Peningkatan Kapasitas</p>
				<p>Maluku:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. KKD Lease 2. KKD Seram Barat dan Seram Utara Barat
				<p>Maluku Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. KKD Pulau Rao dan Tanjung Deheglia 2. KKD Guraici

Save The Children

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Community-led Climate Change Adaptation	2022-2025	Bandung, Jawa Barat	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
2	Hyundai Green Circular Economy Project	2022-2025	Jakarta	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas

UCLG ASPAC					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	<p>Urban-Act (Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities)</p> <p>Di level nasional, UCLG-ASPAC melalui proyek Urban-Act sudah membantu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian kebijakan (policy review) untuk menilai keselarasan vertikal kebijakan PRKBI di tingkat nasional dan daerah, menggunakan metodologi berbasis bukti dengan studi kasus di Padang dan Medan. Kajian ini menganalisis keselarasan antar dokumen perencanaan utama seperti RPJP, RPJM, RKP, dan rencana strategis lembaga. 2) Kajian City Enabling Environment – Environment and Climate Change Governance (CEE-ECG) yg dilakukan di lima negara implementasi proyek Urban-Act untuk menilai indikator-indikator pilar dalam menjalankan climate governance. <p>Contoh kegiatan yang sudah terlaksana di Padang (Sumatera Barat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Climate Action Plan (per Agustus 2025) masih dalam proses penyusunan) 2) Dukungan fasilitasi proses integrasi perubahan iklim dengan Dokumen RPJMD, Renstra, Renja 3) Penyusunan rancangan proyek (capstone) untuk peluang pendanaan. (per Agustus 2025 masih dalam proses penyusunan) 4) Fasilitasi city pairing melalui forum-forum pembelajaran antarkota di jejaring UCLG-ASPAC <p>Contoh kegiatan yang sudah terlaksana di Medan (Sumut):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan rancangan proyek (capstone) untuk peluang pendanaan. (per Agustus 2025 masih dalam proses penyusunan) 2) Fasilitasi city pairing melalui forum-forum pembelajaran antarkota di jejaring UCLG-ASPAC 	2022-2026	Kota Medan, Kota Padang	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
UNDP					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	GEF Forest Area Planning Management in Kalimantan KALFOR	2017-2025	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur	Air	Tata Kelola dan Pendanaan

2		GEF - Global Marine Commodities (GMC)	2017-2022	Nasional	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
3		GCF - NAP Readiness Project	2022-2025	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
UNICEF						
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan	
1	Dukungan teknis konsultasi dengan anak dan kaum muda tentang kebijakan perubahan iklim (NDC, NAP, dan kebijakan sektor sosial sensitif anak)	2025-ongoing	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan	
2	Materi advokasi keterlibatan kaum muda dalam adaptasi perubahan iklim dengan tema biodiversitas, pelestarian lingkungan pesisir, peran masyarakat adat (komik, video)	2025	Publikasi Nasional	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas	
3	Studi sanitasi perkotaan berketahanan iklim di Indonesia	2021	Publikasi Nasional	Air	Peningkatan Kapasitas	
4	Penyusunan Kerangka Kerja Air Minum dan Sanitasi yang berketahanan iklim	2024	Nasional	Air	Tata Kelola dan Pendanaan	
5	Penyusunan PERIKSA (Perangkat Penilaian Risiko Iklim Sanitasi dan Air Minum) di fasilitas kesehatan primer dan penyusunan kompendium teknologi sanitasi, penyusunan Panduan WASH berketahanan iklim	2025	Nasional	Air	Teknologi	
6	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengintegrasian perlindungan sosial adaptif ke dalam strategi asuransi dan pembiayaan risiko bencana	2024	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan	
7	Studi mengenai kebijakan iklim yang sensitif anak	2022	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas	
8	Implementasi pilot perangkat PERIKSA (Perangkat Penilaian Risiko Iklim Sanitasi dan Air Minum) di fasilitas kesehatan primer	2025	Nasional	Kesehatan	Teknologi	

9	Dukungan teknis terkait materi adaptasi perubahan iklim pada sektor gizi untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Nutrisi dan Rencana Aksi Daerah	2024-ongoing	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
10	Dukungan teknis penguatan resiliensi layanan kesehatan primer	2024	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
11	Implementasi pilot untuk PERIKSA, sebuah Perangkat Penilaian Risiko Iklim Sanitasi dan Air Minum di beberapa puskesmas di beberapa kabupaten/kota	2024	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
12	Dukungan teknis kepada Kementerian terkait untuk Sektor Sosial (Kesehatan, Air, Sanitasi dan Kebersihan, Perlindungan Sosial, Pendidikan, Gizi) yang Berketahanan Iklim dan Krisis Lingkungan serta Sensitif Anak	2024-ongoing	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
WHO Indonesia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Pengembangan dan finalisasi Health National Adaptation Plan (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan - RAN APIK) 2025-2030	2019-Ongoing	Nasional	Kesehatan	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Pengembangan finalisasi pedoman Desa Sehat Iklim (Desa-desi " saat ini berganti nama menjadi desa kelurahan sehat iklim)	2020-2025	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
3	Penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan (Health Vulnerability and Adaptation Assessment)	2023	Nasional	Kesehatan	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Pilot Desa Desi (desa sehat iklim) inisiatif	2023	Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Riau	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
5	Advokasi panduan WHO terkait Kesehatan dalam NDC dan penguatan sistem kesehatan berketahanan iklim termasuk fasyankes rendah karbon ke dalam kerangka regulasi kesehatan (Permenkes, renstra, RIBK)	2023	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
6	Pengembangan instrumen Climate Resilient and Environmental Sustainable Health Care Facility (Fasilitas Kesehatan Berketahanan Iklim / Fasbiklin) dan pengintegrasian instrumen ke dalam Sistem Informasi kesling fasyankes (SIKELIM)	2024-2025	Nasional	Kesehatan	Teknologi

7	Pelatihan Climate resilient Sanitation safety planning	2025	Nasional, DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Surakarta, Kabupaten Bantul, Kota Bekasi, DKI Jakarta	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
8	Evidence generation seberapa tangguh air, sanitasi di suatu negara- Global Monitoring	2025	Nasional	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
WRI Indonesia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Advancing Vertical Integration for Climate Change Adaptation in Large, Decentralized Countries: Tapping into the Power of Multilevel Governance	2025	Provinsi DKI Jakarta & Sumatera Barat	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Menuju Pembangunan Berketahanan Iklim: Pengintegrasian Bahaya Iklim Pesisir dan Informasi Rencana Tata Ruang (Studi Kasus di Provinsi Bali)	2025	Provinsi Bali	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
Wahana Visi Indonesia (WVI)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Increasing the Leverage of Inclusive Market Across Indonesia (INCLUSION)	2022-2027	Kab. Kupang (NTT); Kab. Sigi (Sulteng); Kab. Halmahera Utara (Malut)	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
2	Mangrove Adaptive and Resilient Village for Enhanced Livelihood (MARVEL)	Surabaya (2024-2026); Lombok Timur (2024-2026); Jakarta (2025-2029)	Kota Surabaya (Jatim); Kab. Lombok Timur (NTB); Jakarta Utara (DKI Jakarta).	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
3	From Farm to Table	2025-2027	Kab. Asmat (Papua Selatan)	Pertanian	Peningkatan Kapasitas

4	Water for Sumba	2023	Kab. Sumba Barat Daya (NTT)	Air	Teknologi
5	Jakarta Urban School for Youth Climate Change Resilience	2025	Jakarta Utara (DKI Jakarta)	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Child-friendly and Environmental-friendly school Infrastructure for Elementary Students (CERIA)	2024	Jakarta Utara (DKI Jakarta)	Lintas Sektor	Infrastruktur
7	Sustainable, Thriving, Resilient, and Equitable Access to Watershed Management (STREAM)	2025-2026	Kab. Nias Selatan (Sumut)	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
World Wildlife Fund (WWF)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Kajian Risiko Iklim Kabupaten Katingan	2024–sekarang	Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
2	One Planet City Challenge (OPCC)	Sudah berlangsung dari 2015 di Indonesia. Satu periode berlangsung selama dua tahun. Periode yang saat ini berlangsung, yakni 2025–2026.	Nasional	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
Yayasan Agathis Dammara Karbon					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Perluasan Intervensi Biochar Berpolimer Alami Pada Usaha Tani Jagung Untuk Resiliensi Pengembangan Lahan Kering Berkelanjutan	2023	Soppeng, Sulawesi Selatan	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
2	WasteX - Bina Tani Sejahtera	2024- sekarang	Jawa Tengah dan Jawa Timur	Pertanian	Teknologi
3	Studi kelayakan biochar terbuat dari limbah kelapa sawit	2024	Pekanbaru, Riau	Pertanian	Peningkatan Kapasitas

4	Training biochar petani	2022 - sekarang	Kupang, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
5	Training biochar yang terbuat dari limbah kelapa sawit	Mei 2025- Sekarang	Pekanbaru, Riau	Pertanian	Peningkatan Kapasitas
Yayasan Bina Karta Lestari					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Peningkatan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana Lingkungan (TANGGUH)	2017 – now	Kota dan Kabupaten Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
2	Rencana Tanggap Darurat Banjir Pekalongan	2021	Pekalongan	Air	Infrastruktur
3	Penguatan ketahanan iklim masyarakat pesisir berisiko di NTT sebagai hasil dari perbaikan pengelolaan sumber daya dan mata pencaharian ramah iklim	15 Maret 2022 - 15 Maret 2025	Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
4	Proyek Konservasi pesisir dengan meregenerasi hutan bakau Indonesia dan memperkenalkan budidaya perikanan berkelanjutan di Kab Pekalongan	1 April 2022 – 31 Maret 2023	Kabupaten Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
5	Assesment Program MCK Komunal dan Air Bersih di 8 Kelurahan Kota Pekalongan	September – November 2022	Kabupaten Pekalongan	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas
6	Proyek Konservasi pesisir dengan meregenerasi hutan bakau Indonesia dan memperkenalkan budidaya perikanan berkelanjutan di Kab Pekalongan	1 April 2023 – 31 Maret 2024	Kabupaten Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
7	Traveloka Pahlawan Pohon – Restorasi Mangrove di Semarang dan Pekalongan	1 Januari 2024 – 30 June 2024	Kota Semarang dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
8	Proyek Konservasi pesisir dengan meregenerasi hutan bakau Indonesia dan memperkenalkan budidaya perikanan berkelanjutan di Kab Pekalongan	1 April 2024 – 31 Maret 2025	Kabupaten Pekalongan	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
9	Aksi Bersih Pantai (Coastal Clean-up)	Juni 2024	Kota Semarang	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

10	Pembangunan pengelolaan air limbah pabrik tahu terpadu di Semarang	2002 – Sekarang	Semarang, Jawa Tengah	Air	Infrastruktur
Yayasan BUMN					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Penelitian awal & Social Mapping	2025	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
2	Pelatihan Risiko Iklim & Mitigasi Bencana	2025	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
3	Pelatihan Teknik Perikanan Berkelanjutan	2025-2026	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
4	Pelatihan Potensi Bisnis & Sumber Daya Kelautan	2026	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
5	Pembangunan & Pengelolaan Fasilitas Sanitasi & Air Bersih	2026-2027	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Air	Infrastruktur
6	Pengembangan UMKM & Akses Pembiayaan Mikro	2027	Provinsi Bali; Provinsi Lampung (TBD)	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Adaptation through Art and Competition	2025-2026	Wakatobi dan Sabu Rajua	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
2	Pengembangan Rencana Aksi Adaptasi Iklim dan climate budgeting	2025-2027	Bangka Belitung: Kota Kapur, Kotawaringin, Rebo, Dendang, Gantung, Sungai Padang	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
3	Penguatan Kapasitas dan Penyeragaman Adaptasi Iklim	2025-2026	Wakatobi: Waduri, Balasuna, Balasuna Selatan, Kollo Soha, Dete East Nusa Tenggara (Sabu): Lobohe, Lederaga, Molie, Eilogo, Lalapaji, waduwalla	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

4	Pengembangan Dokumen Rencana Pengelolaan Bencana (RPB)	2024-2025	Kabupaten Sabu Raijua	Lintas Sektor	Tata Kelola dan Pendanaan
5	Pengembangan modul perubahan perilaku untuk adaptasi iklim	2024-2025	Wakatobi dan Sabu Raijua	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana	2026-2027	Kabupaten Lingga, Laboh, Senayang Kabupaten Rote-Ndao: Nembrala, Bo'a, Daudolu	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
7	Kajian feasibility penerapan asuransi parametrik untuk terumbu karang	2025	KKP3KDPS, Kabupaten Berau, Kaltim	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
8	Kajian Kerentanan Iklim (Community Vulnerability Assessment)	2024	Bangka Belitung: Kota Kapur, Kotawaringin, Rebo, Dendang, Gantung, Sungai Padang	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
9	Penguatan climate-resilient livelihoods	2024	Raja Ampat Regency (Kapatcol), Sorong Regency (Malaumkarta, Suatolo), Tambrauw Regency (Werur, Werwaf, Wertim, Wertam, Bukit, Suyam)	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
10	Kajian Kerentanan Iklim (Community Vulnerability Assessment)	2023	Wakatobi: Waduri, Balasuna, Balasuna Selatan, Kollo Soha, Dete East Nusa Tenggara (Sabu): Lobohe, Lederaga, Molie, Eilogo, Lalapaji, waduwalla	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
11	Penguatan climate-smart agriculture dan budidaya rumput laut	2023	Kabupaten Wakatobi (Waduri, Balasuna, Balasuna Selatan, Kollo Soha, Dete)	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
12	Penguatan dan lokakarya penyusunan rencana aksi adaptasi dan integrasi ke perencanaan desa	2023	Bird Head Seascapes: Raja Ampat Regency (Atkari, Salafen, Waigama, Aduwei, Solal), Sorong Regency (Malaumkarta, Suatolo), Tambrauw Regency (Werur, Werwaf, Wertim, Wertam, Bukit, Suyam)	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
13	Pelatihan Rainwater Harvesting	2023	Kab Berau, Kaltim: Pegat Batumbuk dan Maratua	Air	Peningkatan Kapasitas
14	Kajian Kerentanan Iklim (Community Vulnerability Assessment)	2022	Bird Head Seascapes: Raja Ampat Regency (Atkari, Salafen, Waigama, Aduwei, Solal), Sorong Regency (Malaumkarta, Suatolo), Tambrauw Regency (Werur, Werwaf, Wertim, Wertam, Bukit, Suyam), Sorong City East Kalimantan (Berau): Bohe Silian, Payung-payung, Pegat Batumbuk, Teluk Alulu, Teluk Harapan	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

15	Kajian Kerentanan Iklim (Community Vulnerability Assessment)	2020	East Nusa Tenggara: Kupang, Serubeba, Londalusi, Papela, Hundiho Central Java: Semarang	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
Yayasan Konservasi Indonesia					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Project Blue Halo S-BEAM	Direncanakan (Menunggu approval board GCF dengan durasi 6 tahun)	Aceh, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Bengkulu	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
2	Climate Smart Shrimp	2023-2025	Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
3	LEAPS-Aquadapt	2024-2027	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
4	Terumbu Karang Sehat Indonesia (TeKSI)	2024 - 2027	Sumatera Barat, Sumba Timur - Provinsi NTT, Raja Ampat - Provinsi Papua Barat, Kaimana - Provinsi Papua Barat Daya	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
5	Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan dan Daerah Aliran Sungai	2023-2029	Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), Sukabumi (Jawa Barat)	Air	Tata Kelola dan Pendanaan
6	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Sumatera	2022-2025	Nias Utara (Sumatera Utara), Bintang (Kepulauan Riau)	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
7	Penguatan Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk ketahanan pangan	2024-2027	Fak-fak & Kaimana, Papua	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan
8	Forest Protecton and Forest Positive Partnership	2024-2028	Sorong Selatan	Pertanian	Tata Kelola dan Pendanaan
9	SOMACORE	2024-2026	Wetar (Maluku), Alor (NTT), Teluk Saleh Sumbawa (NTB)	Kelautan dan Pesisir	Tata Kelola dan Pendanaan

Yayasan Lahan Basah (YLBA)					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Building with Nature (BwN) Indonesia	Oktober 2015-2020	Demak, Jawa Tengah	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
2	Peat and Mangrove Ecosystems Mitigation, Adaptation through Conservation and Sustainable Livelihoods in Indonesia's Peat and Mangrove Ecosystems (IKI-PME Project)	2019 – 2022	KLHK, Pemda Provinsi Sumatera Utara, Pemkab. Tapanuli Selatan, IKI-PME program, Conservation International Indonesia, Kelompok Masyarakat, Swasta	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
3	Ecological Mangrove Restoration through the To Plant or Not To Plant Project (TPNTP) Approach	2021 – 2023	Kalimantan Utara dan Timur	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
4	Global Mangrove Alliance Indonesia - Mobilizing the Mangrove Breakthrough programme (MGAI-MMB)	Juli 2023 – Mei 2025	Kalimantan Utara	Kelautan dan Pesisir	Infrastruktur
5	Peringatan Hari Raya Lahan Basah Sedunia	2018 – sekarang	Demak, Kalimantan Utara dan Timur	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
6	Penerbitan Warta Konservasi Lahan Basah (3 bulanan)	2018 – sekarang	Publikasi	Lintas Sektor	Peningkatan Kapasitas
Yayasan Madani Berkelanjutan					
No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Lokasi (Provinsi, Kab/Kota)	Sektor	Pendekatan
1	Bimbingan Teknis dan Integrasi Konsep Pembangunan Hijau untuk Komitmen Iklim ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	2022	Kalimantan Barat, Riau, Bali, Sulawesi Tengah	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
2	Workshop Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim menuju Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Regional Tengah dan Timur	2023	Bali	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
3	Pengembangan Biodiesel Skala Kecil Berbasis Komunitas "Kesempatan Berkontribusi dalam Penyediaan Bioenergi Lestari melalui Investasi Biodiesel di Kabupaten Kapuas Hulu"	2024 - sampai ini	Kabupaten Kapuas Hulu	Pertanian	Teknologi

4	Climate Crisis Creative Public Campaign	2022 - saat ini	Provinsi DKI Jakarta, Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas
5	Masterclass Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Maluku	2025	Maluku	Kelautan dan Pesisir	Peningkatan Kapasitas

KONTRIBUSI AKTOR
NONPEMERINTAH

**PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM 2.0**







KONTRIBUSI AKTOR NONPEMERINTAH
**PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM**

2.0



Kementerian PPN/
Bappenas